



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/Audiensi
Dengan : 1. Pengurus Serikat Pekerja Perum LKBN Antara
2. Pengurus DPP Serikat Pekerja Indosat
Hari, Tanggal : Selasa, 25 Februari 2020
Waktu : Pukul 13.00 s.d. 17.40 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
Ketua Rapat : H. Ansory Siregar, Lc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Acara : 1. Audiensi terkait Mutasi dan PHK kepada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja LKBN Antara
2. Audiensi terkait PHK Massal di PT. Indosat
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**
25 dari 51 orang Anggota dengan rincian:
1. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
 1. Dra. Sri Rahayu
 2. Dra. Elva Hartati, S.I.P., M.M.
 3. Dr. Ribka Tjiptaning
 4. Dr. H. Edy Wuryanto, S.Kp., M.Kep.
 5. H. Imam Suroso, S.H., S.Sos.
 6. Rahmad Handoyo, S.Pi., M.M.
 7. Muchamad Nabil Haroen, S.Pd., M.Hum.
 8. Dr. Dewi Aryani, M.Si.
 2. **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
 1. Emanuel Melkiades Laka Lena
 2. Drs. H. Darul Siska
 3. Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H.
 3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
 1. Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M.
 2. Ir. Sri Meliyana

4. Fraksi Partai Nasionalis Demokrat

1. Drs. Fadholi
2. Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T.
3. drg. Hj. Hasnah Syam, MARS

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Hj. Nur Nadlifah, S.Ag. M.M.
2. H. Haruna, M.A., M.B.A.

6. Fraksi Partai Demokrat

1. Drs. H. Zulfikar Achmad
2. Hj. Aliyah Mustika Ilham
3. Muhammad Dhevy Bijak

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
2. H. Alifuddin, S.E., M.E.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.
2. Hj. Intan Fauzi, S.H., Llm.
3. Mesakh Mirin, Skm.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

-

KETUA RAPAT (H. ANSORY SIREGAR, Lc):

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI; serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'aala, alhamdulillah* kita diberikan waktu kesempatan untuk beraudiensi atau bertemu rapatkan apa-apa yang kita rapatkan nanti di Komisi IX ini.

Sebelum pertemuan kita dimulai alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.

(DOA BERSAMA)

Berdoa selesai.

Adapun acara kita pada hari ini adalah menerima audiensi terkait:

1. PHK massal di PT Indosat;
2. Mutasi dan PHK kepada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Antara.

Ada 2 (dua) ini yang mau kita bahas hari ini.

Pertemuan ini dalam rangka mencari masukan untuk kami jadikan sebagai bahan rapat dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI.

Tadi Komisi IX ada rapat sidak ke RSCM.

Masih ada yang makan, masih banyak ya?

Sebenarnya biar mengetahui nanti apa masukan dari komisi yang lain, biar Anggota juga tahu, saya kira mungkin 5 menit kita tunggu teman-teman sebentar. Skors 5 menit saja, biar tahu nanti permasalahannya.

(RAPAT DIBUKA UNTUK DISKORS PUKUL WIB)

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Izin, Pimpinan.

Saya mau izin ambil foto boleh tidak sambil *break*?

KETUA RAPAT:

Baik, saya buka skors kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 13.00 WIB)

Teman-teman yang baru bergabung, bahwa acara kita sekarang ini adalah audiensi dengan, sekali lagi, mutasi dan PHK kepada Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Antara, kemudian yang kedua adalah PHK massal terjadi di PT Indosat. Untuk itu kami berikan waktu kepada tamu-tamu kami semuanya.

Siapa yang duluan, Antara atau Indosat? Yang mana ini yang lebih siap? Yang kuning-kuning dulu ya. Berarti pekerja Indosat dulu ya. Siap-siap nanti dari Antara ya. Jadi yang duduk duluan tadi yang kuning ya. Jadi saya

persilakan kepada yang ada di PT Indosat untuk memberikan masukan-masukan/laporan-laporannya semuanya kepada kita.

Terima kasih.

Silakan, Ibu. Perkenalkan namanya semuanya.

Terima kasih.

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang.

Yang mulia Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX,

Yang Mulia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX,

INTERUPSI F-... (.....):

Izin.

Terlalu tinggi 'yang mulia'. Jangan 'yang mulia'.

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Yang terhormat, baik saya ralat kembali.

Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX Negara Republik Indonesia,

Yang terhormat Anggota Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi IX,

Terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa dimana kami sebagai bagian dari rakyat tindo sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut kami sangat fundamental yang mengganggu kehidupan rakyat Indonesia.

Yang pertama, nama saya adalah Raden Roro Dwi Handayani. Saya Presiden Serikat Pekerja Indosat. Saya didampingi oleh seluruh BPH saya. Disebelah kanan saya ada Bapak Setiadi Julianto/Sekretaris Jenderal SP Indosat. Di sebelah kiri saya ada Pak Wahid Effendi, Beliau dari Litbang. Kemudian Pak Syaiful Hadi dari PKB. Pak Katimin (*adviser* PKB). Kemudian Bapak Dwi Priyanto Widodo dari keanggotaan. Bapak Andi Siswanto dari advokasi. Pak Iskandar adalah orang yang terkena dampak dalam kasus Indosat ini. Kemudian Pak Kamaludin/Ketua Lembaga SP Indosat. Pak Azhari (Bendahara). Pak Yudianto/Wakil Sekjen dan terakhir, Ibu Fida, bagian yang terkena dampak dari permasalahan PT. Indosat hari ini.

Terima kasih.

Yang seperti kita ketahui bersama bahwa PT. Indosat merupakan sebuah perusahaan milik BUMN 14,5 persen, dan kemudian sisanya dimiliki oleh Qatar, Telekom, dan juga sebagian kecil orang yang ikut dalam saham. PT. Indosat merupakan sebuah perusahaan yang sangat luar biasa dan dekat dengan Indonesia. Kami terkenal sebagai nomor dua di operator Indonesia dan berkontribusi besar untuk menyumbang negara, baik *revenue* maupun

pajak. Yang kami sayangkan adalah pada saat kami didivestasi yang merupakan sebuah keniscayaan dari sebuah negara, kami tetap lanjut hidup. Kemudian kami diambil oleh STT dari Singapura dan mereka selalu memperhatikan keinginannya karyawan. Mereka tidak mengutak-atik sedikitpun terhadap karyawan, hanya memikirkan *revenue* yang mereka dapatkan.

Kemudian 2008 kami diambil oleh Qatar Telekom sebagai pemilik 65 persen. Dan mulai tahun 2008 itu terus menerus ada gelombang PHK yang tidak pernah kenal henti. Kami memahami sekali bahwa investasi luar negeri merupakan suatu hal yang keniscayaan. Kami fahami sekali bahwasanya negara Indonesia membutuhkan orang luar negeri untuk membantu Indonesia berkembang. Tapi yang kami pahami juga adalah bahwasanya Negara Indonesia juga harus melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kami pahami adalah investasi yang diberikan oleh luar negeri kepada kita itu adalah investasi yang membangun dan juga memberikan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia.

Sejak Qatar kami sudah ada sekitar empat kali proses PHK yang kami lalui. Pertama, karena memang Indosat pada saat itu sebagian besar adalah mantan operator sambungan langsung internasional, dan kemudian dilakukan pengembangan terkait dengan usaha yang kekinian, kami menerima pada saat itu. Dan kemudian selanjutnya ada tiga kali PHK yang dilakukan, dan SP menolak untuk yang terakhir dan minta dipekerjakan.

Semua proses yang dilalui selama empat PHK itu melalui koordinasi dengan serikat pekerja. Semua proses itu dilalui dengan menkomunikasikan dengan serikat pekerja. Makanya setiap langkah yang kami lakukan sebagai serikat pekerja adalah mendahulukan kepentingan perusahaan, mendahulukan kepentingan Negara Republik Indonesia dengan terus bahu membahu untuk membangun Indosat lebih baik lagi. Dan setiap hal yang terkait dengan PHK kami juga mencoba untuk mencari solusi. Dan kami tidak pernah berhenti untuk terus berkontribusi membangun perusahaan ini menjadi yang terbaik.

Karena memang pada saat terakhir, kalau boleh kami sampaikan mungkin Bapak/Ibu yang ada disini mengetahui sekali, terakhir kita ada CEO/Pak Chris Kanter yang kemudian akhirnya *resign* baru enam bulan saja. Semenjak Pak Chris Kanter itu ada di tengah kami maka ruh Indonesia itu hadir. Kami diminta Serikat Pekerja untuk memastikan semua *talent* yang ada di Indosat, terutama yang Indonesia untuk berkontribusi. Kami diminta untuk memberikan kontribusi yang sangat efektif oleh Pak Chris Kanter pada saat itu. Dan kami berterima kasih kepada negara yang telah memberikan salah satu orang terbaik dari PT Telkom, Bapak Arif Mustain, kepada kami. Beliau adalah ruhnya inovasinya Telkom. Pada saat Pak Arif Mustain masuk PT Indosat ternyata ruh inovasi itu melejit, dan akhirnya kami *survive*.

Pak Chris Canter, Pak Arif Mustain, Ibu Intan Abdams Katoppo, itu merupakan pimpinan-pimpinan Indonesia yang membuat kontribusi kebaikan. Maka bila Bapak dan Ibu yang terhormat hari ini melihat pada tahun 2019 pada saat kombinasi Indonesia itu hadir maka yang terjadi adalah Indosat menghasilkan keuntungan yang luar biasa.

Baru kemarin Indosat menyampaikan adanya lompatan keuntungan dan juga adanya perbaikan *performancy* dari keuangan, itu sebagian besar adalah kontribusi dari orang-orang hebat di negara kami. Inovasi kami sudah

bergerak, semuanya kami sudah bergerak. Karyawan pada hari itu merasa sangat nyaman. Karena apa, karena kami diperhatikan. Kami bekerja keras siang dan malam untuk membangun Indosat itu dengan satu komando '*let's make Indosat great again*'. Itu bahasanya Pak Chris Kanter kepada kami. Namun sayangnya pada tahun 2019 Pak Chris mengundurkan diri, dan diganti langsung oleh CEO yang berasal dari Qatar, Ahmad Al Neama. Dan kami sudah melakukan konfirmasi ke negara, dalam hal ini ke Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, apakah CEO itu diperbolehkan atau tidak dalam kaitannya perusahaan Telekomunikasi. Dan kami belum mendapatkan jawaban secara resmi, tapi kami sudah mendapatkan jawabannya dari perusahaan bahwasanya Kemenaker tidak keberatan dengan CEO dari luar negeri.

Pada saat CEO dari luar negeri/Qatar, dalam hal ini Ahmad Al Neama, didampingi dengan wakil direktur dari India/Vikram, didampingi dengan beberapa orang yang dari *expatriat* yang kami indikasikan dibawa dari Myanmar untuk mengelola Indosat, maka mulailah Indosat mengalami perubahan yang cukup serius. Karena apa, karena segala berita baik, segala *culture* yang sudah dibuat baik oleh Pak Chris Kanter, Pak Arif Mustain, Ibu Intan, dan lain sebagainya itu tiba-tiba harus dihentikan dengan sesaat saja.

Tahun 2019 Desember kami mendapatkan isu dari para karyawan. Mereka mengatakan akan ada program dari perusahaan yang dinamakan dengan 'Program Bumblebee', programnya ikut *Transformer*, karena memang CEO kami sangat suka *Avengers* dan *Transformers*. Bumblebee ini sudah kami dengar yaitu program untuk pengurangan pegawai.

Kami berusaha untuk memberikan pandangan atau meminta pandangan dari perusahaan dengan melakukan beberapa klarifikasi, baik secara lisan maupun tulisan kepada perusahaan. Sejak dari 2019 Desember kami minta secara lisan, kemudian 4 Februari 2020. Karena isunya sudah sangat *santer*, dan seluruh karyawan sudah sangat resah, hingga yang tadinya 2019 kita bisa fokus untuk mengejar *revenue* yang tinggi maka sudah mulai agak ada kegelisahan.

4 Februari 2020 kami mengirimkan surat konfirmasi atas isu PHK dan *managed service* di lingkungan PT Indosat. Kami menanyakan berbagai macam hal. Karena yang kami dengar adalah *technical operation* PT Indosat yang hari ini di isi oleh orang-orang terbaik bangsa Indonesia, dari ITB, dari ITS, dari UI, itu direncanakan akan dilakukan proses *outsourcing* untuk kemudian diberikan kepada Ericsson. Ericsson ini kami indikasi tidak kami kenali, karena merupakan *given* dari Qatar langsung perintah *outsourcing*-nya. Jadi *outsourcing* yang kami ingin klarifikasi apakah benar, karena kami sering di dalam proyek-proyek sebelumnya Qatar sering melakukan *bundling* terhadap proyek kami. Ketika dia *managed service* di beberapa anak perusahaannya maka dia jadikan satu untuk mendapatkan yang lebih murah. Kami hanya mencoba klarifikasi apakah Ericsson ini.

KETUA RAPAT:

Bisa dijelaskan sedikit tidak *managed service* itu. Apa itu sama dengan kontrak, PKWT, atau sama dengan *outsourcing*? Coba dijelaskan apa itu *managed service*.

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Baik Pak.

Outsourcing itu adalah sama dengan PKWT ataupun kontrak yang sekarang berlaku. Dan yang pertamakali di telekomunikasi itu adalah XL dengan Huawei nya.

Kemudian kami pernah *consult* juga dengan teman-teman di Telkomsel. Mereka waktu itu menjelaskan bahwasanya mereka menolak untuk *outsourcingnetwork*. Karena apa, karena *network* adalah *core* perusahaan. Apa yang dimaksud dengan *core* perusahaan? Apabila tidak ada hal tersebut maka perusahaan itu berhenti. Oleh karena itu maka SP Indosat dalam *positioning* untuk memberi masukan kepada perusahaan terkait dengan *outsourcing* Ericsson untuk *network*. Karena apa, karena itu akan bermasalah dengan negara. Ada undang-undang yang mengatur itu.

KETUA RAPAT:

Dan *managed service* itu, kata lain dari *outsourcing*, itu untuk *core business* juga

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Iya Pak.

Jadi sebagian besar yang dimaksud dengan *managed service core business* Ericsson itu dilakukan untuk *network*, dan *network* adalah *core business*. Tanpa adanya *network* maka kita tidak mungkin menjual *simcard* kami atau apapun produk layanan dari kami.

Dan yang paling penting, kami pernah mendengar juga sebuah masukan yang luar biasa, kami hanya mendengar ya Pak, mungkin perlu di *crosscheck* juga kebenarannya, salah seorang komisaris yang anggota badan intelijen yang ada di kami Beliau mengatakan harus diperhatikan PT Telekomunikasi ini, karena telekomunikasi ini penting untuk negara. Jangan sampai ada bagian dari telekomunikasi yang menyimpan semua data-data yang terkait dengan negara itu kemudian menjadi bagian dari yang sifatnya asing.

Ericsson yang kami coba untuk konfirmasi ke perusahaan itu kami belum tahu sampai hari ini. Apakah itu memang merupakan *arrangement* besar yang dari Qatar? Karena bahasanya Ahmad Al Neama pada saat bertemu kami 14 Pebruari, ini merupakan sebuah pekerjaan besar, desain besar, untuk *me-managed service*, *managed service* terbesar di dunia untuk Ericsson ini.

Jadi mungkin dapat kami lanjutkan kembali, Pak Pimpinan.

Kemudian mereka pada tanggal 5 Februari menyampaikan akan mendiskusikan kepada serikat hal-hal yang menjadi konsern serikat. Dan kemudian pada tanggal 12 Februari mereka membatalkan jadwal kita untuk bertemu tanggal 12 dan kemudian memberikan jadwal baru tanggal 14 Februari 2020 Jam 12.00 sampai dengan Jam 17.00. Ini akan menjadi sangat penting, karena pada tanggal 14 Februari 2020 Jam 12.00 dan 17.00 itu adalah saatnya mengeksekusi secara serentak seluruh karyawan Indosat hari itu juga dan itu menyakitkan kami di serikat pekerja.

Tanggal 12-13 Februari manajemen mengumpulkan sekitar SVP (*Senior Vice President*), manajemen layer nomor tiga dan *vice president* di Hotel Millenium untuk dilakukan *roll play counseling* terhadap proses PHK.

Jadi mereka datang. Undangannya itu bukan untuk *counseling* atau belajar *counseling*. Undangannya adalah kita akan membahas tentang *new way of working* (cara kerja baru). Tapi sampai sana mereka *handphone*-nya dikumpulkan di satu tempat, kemudian mereka masuk ke dalam, di dalam mereka diberitahu bahwasanya mereka adalah bagian dari *counselor* yang akan melakukan PHK yang akan dilakukan tanggal sekian untuk kebutuhan perusahaan, *resizing*, *right sizing*, *outsourcing*, dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian mereka dicatat NDA.

Bapak/Ibu perlu ketahui bahwa *counselor* teman-teman kami itu sampai dengan hari ini merasa sangat tidak nyaman. Dan ada yang bercerita kepada kami, selama tiga hari memegang amplop nama orang yang di PHK, dan itu adalah teman-teman mereka, itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa beban. Mereka tidak dapat tidur. Karena sebenarnya PHK itu adalah urusan yang ada di ruang-ruang tertentu, dan mereka dilibatkan tanpa mereka mengetahui alasannya, kecuali tiga hal, *resizing*, *outsourcing*, dan akan berkembang dengan cepat.

Bapak/Ibu bisa bayangkan bahwasanya yang akan dihadapi adalah temannya sendiri. Dan itu sudah terjadi, ada beberapa orang yang sampai hari ini tidak disapa, tidak ditanya, dan kemudian dianggap sebagai orang yang melakukannya padahal dia hanya *messengers*/penyampai pesan.

KETUA RAPAT:

Jadi saya ingin menekankan, tanggal 14 Februari ini di undang untuk *newest of working* tapi isinya lain?

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Iya betul.

KETUA RAPAT:

Berarti penipuan ya.
Terus?

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Jadi pada saat kami tanggal 14 kami semua bergembira, karena sebelumnya ada *message* dari perusahaan akan membagikan bonus tahun 2019 di bulan Maret, hingga semua orang merasa sangat gembira untuk mendapatkan kabar tersebut. Mereka berbondong-bondong ke hotel dalam proses gembira dan tidak mengetahui adanya sesuatu hal yang tersembunyi.

Tapi serikat pekerja, karena kami mengetahui dari salah seorang *counselor* yang tidak bisa tidur, dan malam hari dia datang untuk mengatakan bahwasanya "di tangan saya ada orang yang akan di PHK". Dan kami saat itu tidak bisa bersikap langsung, karena belum menjadi fakta. Makanya kami memberikan edukasi kepada seluruh karyawan untuk dapat melihat dan

berjaga-jaga. Hanya saja ternyata kenyataan itu lebih pahit daripada yang kami bayangkan.

Yang pertama, Jam 12.00 disediakan makanan untuk seluruh orang. Ada di 11 hotel mewah yang ada di Jakarta, Kempinski, Mandari, Hyatt, dan beberapa hotel kecil, dan di luar Jawa juga seperti itu, ada 11 hotel, diberikan makan. Dan kemudian selama 20 menit disampaikan masalah bagaimana perusahaan akan berkembang kedepannya. Kita butuh *resizing*, *right sizing*, kita butuh *outsourcing*, dan sebagainya.

Setelah video dari CEO kami, dan dari salah seorang direksi kami, langsung semua orang itu di *freeze*, dan mereka langsung dipanggil satu persatu untuk menuju kamar hotel yang didalamnya ada kasur. Teman-teman sangat merasa bingung kenapa harus masuk kamar hotel. Pada saat masuk ke kamar hotel disana sudah ada satu orang teman yang *counselor* yang sudah dikondisikan tanggal 12 tadi untuk menyampaikan. Bagi yang tidak di PHK dia hanya disampaikan berikut SK anda hari ini tidak berubah. Yang di PHK maka disampaikan, berikut PHK dari perusahaan yang bersifat final dan mengikat. Dan didalamnya itu ada sejumlah uang. Yang tanggal 14, 4 jam anda tandatangan. Ini ilustrasi saja ya, Ibu/Bapak. Jika gajinya dia 12 juta, pada tanggal 14 mereka mendapatkan 600 juta. Pada saat besoknya sudah berubah menjadi lebih sedikit, besoknya lebih sedikit, hingga terakhir tanggal 21 maka dia akan mendapatkan uang sekitar 300 juta.

Kemudian yang paling parah ada tabel khusus paling kanan, tabel *resign*, sebesar 79 juta. Yang kita bingung, untuk apa tabel itu disampaikan disitu? Karena *counselor* akan mengatakan “setiap hari demi hari anda final di PHK, dan pada saat anda berubah sehari demi hari akan berkurang uangnya dari sini sampai sini”. Itukan membawa ke arah yang salah, karena untuk apa ada tabel *resign* diletakkan di tempat Undang-Undang Nomor 13 yang seharusnya paling terakhir yang diberikan. Pada hari itu seluruh orang menghubungi kami.

Ada sebuah kisah tersendiri. Kami diletakkan di sebuah tempat perundingan, dimana pada saat kami masuk ke tempat perundingan kami tidak mendapatkan *signal*. Jadi seluruh teman-teman memprotes dan mengatakan “kami sudah dibeli oleh perusahaan, karena ketika kami di telepon kami tidak ada yang bisa dihubungi”, padahal di jam yang sama di lokasi yang berbeda kami sedang berdiskusi dengan manajemen menolak semuanya, meminta untuk mengembalikan kepada undang-undang, dan *signal* kami diganggu. Dan berapa banyak teman-teman yang merasa karena sendirian tidak bisa berkelit. Ini final, tidak ada serikat, maka mereka tandatangan di tempat pada saat itu juga. Ini satu hal yang sangat melukai. Karena kami adalah lulusan ITB, lulusan ITS, lulusan UI, dan lulusan diberbagai macam perguruan tinggi di Republik Indonesia ini yang tahun 1993 kami adalah penyumbang yang terbesar *revenue* untuk Indonesia, tapi hari ini kami diakhiri di sebuah kamar hotel. Itu sangat menyakitkan.

Pada saat kami meminta untuk manajemen melakukan penundaan, karena kami berpikir Undang-Undang 1/51, Undang-Undang Nomor 13/151, kemudian PKB kami secara khusus menyampaikan bahwasanya PHK itu baru bisa dilakukan setelah berunding dengan Serikat. Jawaban manajemen adalah mereka mengatakan “tidak perlu, karena kondisinya adalah tidak ada sanksi jika kami tidak berunding dengan serikat”.

Yang berikutnya adalah akan memperlama waktu eksekusi PHK, karena tidak jelas kesepakatannya kapan. Sepakat atau tidak sepakat akhirnya karyawan yang memutuskan. Dan jika karyawan tidak sepakat maka kita akan berselisih. Dan kami sudah mengatakan di ruang kami berada, yang pertama bahwasanya secara tidak langsung kami menyatakan Republik Indonesia ini membuat undang-undang negara untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Anda melanggar PKB? PKB adalah sebuah kitab suci bagi perusahaan dan pekerja yang ada didalamnya. Apabila sebuah kitab suci saja sudah dilanggar, apa jadinya orang-orang yang mengaku memahami kitab suci itu. Kalau setiap orang berhak untuk melanggar kitab suci, setiap orang berhak melanggar apapun yang dikatakan kebenaran versi mereka, maka tidak ada lagi yang namanya kenyamanan atau keadilan, karena yang ada adalah setiap orang bisa memaksakan kehendaknya sesuai dengan cara berpikirnya dan sesuai dengan keinginannya, dan itulah yang terjadi hari itu 14 Februari 2020 di Jakarta dan di kota besar dari pengusaha PT Indosat/CEO Ahmad Al Neama, CHRO Irsyad Syahroni pada 677 versi mereka, sampai hari ini kami tidak tahu versinya berapa karyawan Indosat yang usia kerjanya masih produktif yang berkontribusi kepada negara dengan cara membeli. Karena mereka semuanya itu dalam posisi mengharapkan bonus, mereka ingin berbagai, mereka ingin memberikan yang terbaik, dan itu ternyata semuanya hilang. Bahkan walaupun bonus diberikan kepada yang PHK, mereka tidak mendapatkan THR, padahal mereka dihabisi per 31 Maret dan ada yang per Juli.

Berulang kali saya coba sampaikan bahwasanya *culture*, investasi asing, kami/Indonesia tidak pernah menolak, kami *welcome*. Pada saat Qatar pertamakali datang 2008 Serikat Pekerja Indosat memberikan spanduk yang sangat besar dengan bahasa Arab '*Ahlan Wa Sahlan Qatar*'. Karena kami memahami butuhnya investasi untuk mengembangkan negara ini. Tapi itu dinodai dengan inuitan yang salah terhadap orang-orang yang berinvestasi. Inuitan yang salah itu pastinya dari orang yang bekerja di Indonesia ini tapi tidak memikirkan tentang rakyat Indonesia, hanya QPI pribadi. Dan itu disampaikan kepada kami secara tidak langsung, "*No heart feeling*, bukannya *gua* tidak respek sama serikat pekerja, *very sorry*. Kalau *Gua* kasih tahu serikat pekerja, kalau *Gua* bocorin semuanya, maka tidak akan mungkin PHK seefektif ini. *Elu* akan lihat berapa banyak orang yang akan tandatangan hari ini, karena memang *gua* tidak melibatkan serikat pekerja dan tidak melibatkan orang-orang banyak, karena situasinya tidak memungkinkan".

Dan asal Bapak/Ibu tahu, pada hari yang kejadian itu saya sempat masuk kamar mandi dan di kawal oleh *security*, karena ternyata EO-nya adalah di indikasi salah satu *security company* yang ada di Jakarta. Pada saat saya salah masuk ruangan, saya lihat CEO saya sedang menatap 11 kamera/11 TV atau beberapa TV yang saya indikasi jangan-jangan itu dia sedang melihat seluruh eksekusi yang ada di hotel-hotel tersebut. Dan pada saat saya keluar, karena saya salah kamar, saya bertanya sama orang lain. Orang lain itu dimarahi karena saya masuk ke ruangan itu. Sehingga saya bilang "Saya presiden serikat pekerja. Kalau tidak suka sama saya, lihat saya, dan pastikan saya tidak masuk lagi ruangan itu". Dan saya didorong oleh *security*.

Dan pada saat perjalanan diskusi, kami keluar bertemu sama seorang yang sedang menggigil. Satu setengah tahun lagi dia akan pensiun, dan anaknya masih banyak. Dan dia mengatakan "Ibu Roro, saya tidak sanggup menghadapi ini", dia menggigil. Saya bilang "Tidak apa-apa Pak, ini akan baik-baik saja. Bapak tenang saja, kami ada disini, serikat ada disini". "Ibu Roro, saya tidak sanggup, saya boleh pulang tidak, saya tidak sanggup. Katanya kalau saya pulang nanti uangnya PHK nya berkurang terus. Saya boleh pulang tidak Bu, saya tidak sanggup". Dan saya bilang sama HRD "boleh pulang tidak dia? Saya mohon dia pulang". Kata HRD ini "tidak bisa, ini harus dilalui". Apakah pantas perlakuan seperti itu dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mengaku sebagai orang yang beradab?

Selanjutnya kami mencoba untuk membangun komunikasi. Setiap hari datang di ruangan kami begitu banyaknya orang menyampaikan, terutama yang perempuan/yang muslimah yang merasa SP tidak memberikan protes keras. Karena kami itu tidak terbiasa masuk kamar hotel, kami di pecat. Kalau kami pingsan siapa yang menolong kami, siapa yang pegang kami kalau kami pingsan. Saya pikir *it's very i don't know*. Saya dikatakan terlalu emosional. Tapi menurut saya sebagai seorang presiden yang perempuan, bahkan Ibu Mirah Sumirat juga hadir pada hari itu mendengarkan keluhan mereka, dan dia presiden yang perempuan, dia mengatakan "Elu seharusnya menolak dan memberikan surat protes keras, karena ini adalah merendahkan harkat martabat perempuan". Mungkin ada orang yang biasa keluar masuk kamar hotel. Tapi ada yang tidak biasa, apa pantas perempuan dibegitukan?

Akhirnya kami melayangkan sebuah protes keras kepada perusahaan melalui surat yang kemudian kami juga mengajak diskusi. Tapi ternyata tidak ada jawabannya sampai hari ini. Bahkan jawaban itu ditanggapi dengan menyampaikan kepada seluruh orang yang terkena dampak PHK bahwasanya PHK yang akan kami lakukan di Indosat hanya 140 hari saja, akan kami lakukan dengan cepat. Dan bila anda melawan maka ini adalah sebuah keniscayaan. Bahasanya adalah "Jika kami adalah pengusaha, maka kami akan bisa melakukan sesuai dengan keinginan kami. 140 hari saja di pengadilan dan kalian semua selesai". Dan pada saat itu sudah, untuk apa lagi ada yang namanya institusi serikat pekerja.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Apabila hari ini kami/serikat pekerja yang dilindungi undang-undang apabila hari ini perjanjian kerja bersama ada aturan khusus yang mengaturnya dan dilindungi undang-undang, apabila seluruh warga negara Republik Indonesia ini hanya bisa mengandalkan undang-undang untuk melindungi apa yang benar menurut mereka. Dan pada saat ada orang di luar sana mengatakan "tidak perlu lagi nego dengan serikat, kami bisa langsung masuk ke ruang pribadi itu", padahal itu dilindungi undang-undang. Menurut kami buat apa ada Undang-Undang Serikat Pekerja, buat apa ada orang berkumpul untuk menuju ke serikat pekerja. Karena artinya apa, setiap pengusaha yang merasa dia bermasalah, padahal tidak ada masalah, Indosat bagus, *revenue*-nya naik, tapi karena hanya dia merasa tidak yakin, tidak suka, tidak merasa kita pintar Warga Negara Republik Indonesia, dan mereka berhak memecat, dan kami tidak dilindungi, maka mulai hari ini tidak akan ada lagi yang mempercayai institusi serikat pekerja. Buat apa ada serikat

pekerja, karena kami bisa di akses langsung. Dan tidak ada sanksi yang jelas, tidak ada pemanggilan. Dan yang lebih penting lagi, untuk para investasi asing yang merasa mereka harus murah dan harus membayar seperlunya saja untuk rakyat Indonesia ini, mereka tidak akan segan-segan melakukan hal yang sama kedepannya memecat bangsa Indonesia supaya kita keluar, tidak bekerja lagi, tidak bisa membeli untuk Indonesia. Dan mereka meng-*hire* asing jauh lebih banyak dengan 15 ribu US Dollar/25 ribu US Dollar perbulan jauh dari rakyat Indonesia dapatkan, dan mereka bawa pulang uang itu ke negaranya. Dan pada saat tidak ada perlindungan kepada rakyat atas hal ini maka ada sudah ada kematian bagi negara ini.

Terima kasih. Saya mohon untuk dapat dimaafkan apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan sepenuhnya kami sangat berharap agar Pimpinan dan Anggota dapat memfasilitasi kami untuk bertemu antara pengusaha dan kementerian. Karena apa, karena kementerian adalah satu-satunya institusi yang bisa mengatakan kepada Indosat pelanggaran PKB itu tidak boleh dilakukan, *event* hanya untuk mempercepat eksekusi atau hanya untuk membuat situasi menjadi lebih cepat veri mereka. Karena ini Negara Indonesia dan asing harus patuh kepadayang ada di Indonesia.

Terima kasih.

*Wabillaahitaufiq Wal Hidaayah
Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Terima kasih, Ibu Raden Roro .

Dari Sekjen atau dari yang lain-lainnya ada tambahan? Waktu sedikit saya kasih, ada? Silakan kalau ada tambahan.

SEKJEN SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Saya Setiadi Yulianto.

Yang kami permasalahan adalah di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 di Pasal 151, terutama ayat (2), disitu disebutkan bahwa 'jika segala upaya sudah dilakukan tetap PHK harus dijalankan, maka pengusaha wajib merundingkan dengan serikat pekerja'. Itu yang kami berkali-kali mengatakan kepada manajemen "tolong anda hormati ini". Tapi manajemen mengatakan "Tidak, kami *jump* langsung ke eksekusi, *jump* langsung ke karyawan. *Toh* ujung-ujungnya karyawan yang memutuskan". Itu yang kita protes. Kalau begini caranya nanti buat apa ada undang-undang, padahal undang-undang adalah domainnya Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, itu seakan-akan kan melecehkan satu institusi undang-undang. Itu yang sangat sesalkan dan kami sayangkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tadi ada yang sudah ter-PHK ya, ada perwakilannya satu orang? Inikan yang Bapak-bapak dari serikat pekerja masih bekerja di Indosat kan? Ini yang sudah ter-PHK salah satu ada? Mewakili saja salah satu. Silakan Ibu.

PEKERJA PHK INDOSAT:

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Nama saya Elvida Baswan. Saya bekerja di PT Indosat sejak tahun 1998 pada tanggal 15 Pebruari. 22 tahun tepatnya saya bekerja di Indosat. Dan tanggal 14 Pebruari saya menerima hadiah yang sangat indah dari Indosat. Ooredoo sebetulnya, yang saya tekankan disini Ooredoo bahwa surat PHK yang saya terima.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Presiden kami/Ibu Roro bahwa PHK oke saja jika memang ada diskusi dengan serikat dan karyawan. Tapi yang kami dapatkan kemarin adalah satu penipuan. Ini *point of* saya sendiri sebagai karyawan. Karena saya datang kesana mengharapkan satu hal gembira. Karena namanya judulnya *town hall*, dan belum pernah ada *town hall* itu yang isinya PHK. Selama ini *town hall* itu adalah mengumpulkan karyawan dan manajemen. Saya tahu agenda *town hall* karena saya pernah menjadi asisten CEO di Indosat.

Kemudian kami datang diminta untuk pakai *dress code*-nya merah, warna kemerdekaan. Tapi kami dikumpulkan di satu hotel yang menurut saya tidak pantas. Dimana EO nya adalah kami indikasikan itu adalah perusahaan *security*, jadi kami seperti seorang terpidana, orang pesakitan dikumpulkan dalam satu ruangan. Ketika sudah masuk tidak boleh keluar lagi. Kemudian dipanggil namanya satu persatu. Harus membawa barangnya, tidak boleh ada yang ditinggalkan.

Lalu yang saya heran itu adalah saya dimasukkan ke dalam sebuah kamar hotel dimana sudah ada laki-laki di dalam. Dan saya masuk sebagai perempuan, saya masuk sendiri. Karena saya menghormati Indosat, saya masuk. Tapi saya pikir itu bukan kamar hotel yang betul-betul masih bentuk ada tempat tidurnya. *At least* dia memanusiakkan kita lah. Dirubahlah seperti layaknya ruang *meeting*. Tapi ternyata tidak, ternyata masih berbentuk kamar. Sampai sekian detik saya menyadari bahwa "*oh my god*, ini ada tempat tidur, ada kamar mandi, ada meja di pojokan, ada laki-laki di dalam", dan saya masuk. Jika orang *snapshot* saja kejadian itu apa sih yang terpikir? Saya menghampiri laki-laki yang bukan muhrim saya yang Ooredoo katanya perusahaan dari negara Islam melakukan ini kepada kami. Bukan sebentar saya bekerja di Indosat Ooredoo, 22 tahun saya mengabdikan, dan ini yang saya dapatkan.

Saya di paksa, menurut saya itu pemaksaan, karena dia bilang bahwa ini surat PHK final. Untungnya saya tidak bodoh. Saya bilang "berdasarkan apa?". Dan *counselor* saya *which is* itu adalah teman saya sendiri, saya bilang "kita tidak perlu berseteru Mas, maaf, karena sebetulnya Anda juga sebagai *messenger*. *Sorry* saya tidak akan tandatangan surat itu, dan tidak akan saya baca". Saya menolak untuk tanda tangan. Tapi mungkin teman-teman saya yang mungkin mentalnya tidak seperti saya dalam kondisi seperti itu. Masuk kamar hotel saja sudah *nderedek* ya perempuan. Lalu kemudian

dipaksa tandatangan, mereka mau tidak mau tandatangan. Tetapi kalau saya memang menolak dengan segala konsekuensinya.

Kemudian saya keluar dari kamar itu. Saya karena berhubung itu sudah lewat Ashar, saya melihat ada *musholla* disitu, saya bilang “maaf, saya mau sholat dulu”. Tapi apa yang saya dapatkan, “tidak bisa Bu, Ibu harus keluar sekarang”. Saya bilang “saya mau sholat dulu, dan itu *musholla*”. “bukan, itu toilet”. Sedemikiankah saya, hinanyakah saya sebagai pekerja Indosat yang sudah puluhan tahun. Apa sih kontribusi mereka yang baru beberapa tahun ketimbang kami yang puluhan tahun merangkak dari nol. Tapi itu yang saya dapat.

Terus terang sebagai perempuan dan sebagai warga negara Indonesia saya bekerja di Indosat sangat-sangat terlukai perasaan saya. dan saya rasa juga perasaan bangsa Indonesia. Kantor kami masih di ring satu, dan itu orang asing melakukan itu ke kami/bangsa Indonesia di depan mata kepala kami jelas-jelas penghinaan besar untuk saya.

Setelah saya keluar tidak boleh naik lagi, tidak boleh bercakap-cakap. Bahkan di lorong pun tidak boleh bercakap-cakap. Salah satu teman saya pun perempuan sempat bersitegang karena memang langsung di usir dari ruangan itu, dari lantai itu harus segera keluar. Bahkan beberapa orang dari teman saya memang keluar itu menuju ke tempat sampah, di suruh melewati tempat sampah, karena tidak boleh kembali lagi ke ruangan itu, tidak boleh ada komunikasi lagi. Saya rsaa itu sangat tidak pantas.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu.

Kita ke Antara atau masih ada yang mengganjal?

Silakan Pak.

PEKERJA PHK INDOSAT:

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi IX yang terhormat memberi kesempatan kepada saya.

Nama saya Tengku Iskandar Zulkarnain. Di Indosat itu kurang 3 bulan lagi saya 20 tahun di Indosat bekerja. Dan seperti yang disampaikan tadi adalah saya hanya menyampaikan bahwa kronologis kejadiannya saja. Jadi benar seperti dikatakan oleh Ibu Presiden tadi cerita seperti itu, juga teman saya, Ibu Wina, bahwa di hari tanggal 14 itu kita di undang untuk acara *town hall*. Saya kebetulan dapat di Hotel Pullman di Thamrin. Kita setelah Jum'atan, itu Jum'atan tesaerah dimana, yang penting jam satu itu harus sampai disana. Setelah dapat makan, duduk di lantai ala kadarnya disana di lorong auditorium disana. Kemudian kita dikumpulkan di ruangan. Dan acara dibuka oleh EO. EO itu adalah orang yang bukan orang yang dari Indosat itu. Mungkin orang yang sengaja di bayar untuk itu. Terus pembukaan dengan video yang ditampilkan pembicaraan dari presiden direkturnya Indosat.

Kemudian setelah itu kita semua di giring. Saya ingin menambahkan informasi yang disampaikan tadi, kita itu di giring/dipanggil 10-10 orang. Itu dibawa ikutin orang dinaikkan ke lantai tiga hotelnya Pullman. Kita tidak bisa keluar, karena kita tidak punya akses, kan mereka yang punya itu. Sampai kesana masing-masing dibawa ke ruangan hotel/kamar hotel masing-masing, ke kamar tidur. Kamar tidur disana sudah menunggu *counselor*-nya. Dia langsung mengatakan bahwa 'Anda di PHK sesuai dengan undang-undang, dan akan berakhir tanggal 31 maret". Tapi ada pilihan, pilihan paket A nilainya sekian, paket B, paket C, paket D.

Saya kebetulan dipanggil jam lima sore (17.00). Karena saya abjadnya T agak belakangan namanya. Terus dikasih waktu, kalau dari sekarang sampai jam sembilan malam tidak tandatangan berarti hilanglah peluang untuk nilai yang di paket A. Besoknya berubah lagi, nilainya turun lagi, turun lagi. Sampai hanya dapat sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Dan ada satu lagi, paket *resign*, yang tadi disampaikan oleh Ibu Roro.

Kita kan tidak tahu ini ceritanya apa. Tujuannya datang kesana kita pikir perusahaan akan memberikan remonerasi apa buat kita. Ternyata yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mimpi buruk bagi semua karyawan pada saat itu, kita semua di PHK. Tanpa ada cerita sebelumnya, kesalahan kita apapun tidak pernah disampaikan. Dan kalau kita tanya kepada *counselor*-nya undang-undang apa yang mau di ini juga dia itu tidak mengerti juga. Saya di pecat berdasarkan apa, undang-undang apa, juga tidak tahu *counselor*-nya.

Yang terjadi seperti itu. Akhirnya karena saya menganggap saya ingin mencoba menguji undang-undang itu apakah benar-benar undang-undang itu melindungi seluruh pekerja di Indonesia, akhirnya saya *bismillaah* saja. Apapun yang terjadi, resiko terburuk apapun saya ambil, karena ini adalah demi anak cucu kita nanti. Kalau seandainya hari itu semua orang setuju, tidak ada arti lagi undang-undang itu berlaku di Indonesia saya pikir pada saat itu.

Akhirnya pulang ke rumah saya ceritakan ke keluarga, saya mencoba ceritakan ke istri saya. Saya kasih waktu dua menit, karena jam sembilan malam itu harus saya sampaikan saya terima atau tidak. Saya ceritakan dua menit sebelum jam sembilan ke istri saya. Dia bilang "Abang, kalau seandainya itu adalah keputusan yang terbaik bagi Abang, *Allah* sudah menentukann rezeki itu dari langit, terserah menurut Abang". "Tapi yang Abang perjuangkan adalah itu adalah buat anak/cucu kita nanti. Begitu kita tidak ada lagi kan mereka anak-anak kecil-kecil itukan akan bekerja. Kalau seandainya undang-undang itu tidak melindungi mereka ya buat apa mereka bersekolah punya impian tinggi ternyata negara tidak melindungi mereka.

Demikian yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan yang terhormat.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Baik, bagus sekali masukannya.

Cukup ya?

LITBANG INDOSAT:

Boleh satu lagi?

Nama saya Wahid Effendi, saya dari Litbang.

Saya mau menyampaikan sambungan dari Pak Iskandar bahwa sampai dengan sekarang kami di serikat pekerja menerima 52 aduan karyawan yang menolak untuk di PHK dengan harapan tetap bisa dipekerjakan lagi di Indosat.

Yang terjadi adalah, pada tanggal 24 kemarin itu sudah dilakukan undangan *be partit*. Dan kemudian karena dia menolak akhirnya panggilan yang kedua, yaitu tanggal 27. Ini semuanya karyawan yang menolak itu sudah memberikan kuasa kepada serikat pekerja untuk di advokasi. Tapi sampai dengan sekarang manajemen tidak pernah menganggap serikat pekerja sebagai advokat daripada karyawan. Jadi mungkin perlu ada penekanan. Tadi *be partit* itu ada tiga undangan, setelah itu kemudian menuju kepada tripartit.

Ini mungkin yang perlu ditekankan juga bahwa serikat pekerja sudah tidak diakui atau tidak dianggap lagi oleh manajemen. Padahal undang-undang jelas menyampaikan bahwa serikat pekerja adalah bagian daripada yang dilibatkan dalam keputusan PHK karyawan.

Paket *resign* tadi yang disampaikan adalah paket mengundurkan diri. Jadi paket yang diberikan adalah paket mengundurkan diri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Serikat Pekerja.

Sebelum kita ke teman-teman, langsung ke Antara dulu.

Silakan tamu kami yang kedua dari Serikat Pekerja Perum LKBN antara. Perkenalkan namanya.

KETUA SERIKAT PEKERJA LKBN ANTARA:

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore.

Bapak/Ibu Pimpinan dan juga Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang pertama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih dari kami pengurus Serikat Pekerja Antara dimana hari ini kami diterima untuk beraudiensi/berdiskusi dengan Bapak/Ibu yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Komisi IX.

Tidak berpanjang lebar kami ingin menyampaikan bahwasanya, sebelum kami sampaikan ke materi persoalan ketenagakerjaan di perum LKBN Antara, nama saya Abdul Gofur, saya Ketua Umum Serikat Pekerja Antara. Saya juga didampingi oleh Pak Dewanto Samudro/Sekjen Serikat Pekerja Antara. Disebelahnya ada Ibu Nana, kita panggilnya Ibu Nana, namanya Ibu Hari Pangudilaksanawati, Beliau juga Dewan Penasehat.

Sebelahnya, Pak Tirta, beliau Ketua Tim Divisi Advokasi Serikat Pekerja. Ada Bang Rahmat Nasution/wartawan senior, pernah juga menjadi kepala biro di beberapa luar negeri. Namanya Bang Rahmat Nasution, Beliau Dewan Pakar. Dibelakangnya ada Pak Andi Jauhari, sama, wartawan senior juga, sudah beberapa wilayah di Indonesia. Beliau dewan pakar. Ada Ibu Sofiyah Prameswari, Bendahara II Serikat Pekerja Antara. Karena Bendahara I nya di PHK. Ada Pak Luthfi. Beliau walaupun sudah tua tapi masih pegang divisi bisnis dan sosial. Di Serikat Pekerja ada Wawan, Beliau ahli media sosial. Sebelahnya Sekjen Aspek.

Serikat Pekerja Antara dan Indosat sama Pak, berada dalam satu afiliasi Aspek Indonesia, berkonfederasi di KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia).

Yang ingin saya sampaikan pertama adalah terkait dengan hubungan ketenagakerjaan di Perum LKBN Antara, diawali dari awal tahun 2016. Di 2016 ini awal bencana mungkin menurut kami karyawan Perum LKBN Antara menerima rezim direksi yang memang otoritarian, benar-benar otoriter. Di awal Beliau masuk, belum bekerja apa-apa sudah menaikkan gaji dan juga melengkapi fasilitas direksinya dengan mobil baru, dengan fasilitas ruangan baru. Padahal belum bekerja apa-apa, dan tidak ada di anggaran sebelumnya. Beliau pakai uang perusahaan untuk menggunakan kenaikan gaji dan fasilitasnya.

Kami/Serikat Pekerja Antara saat itu mendukung-mendukung saja, artinya tidak dalam rangka mendukung secara resmi. Mungkin Beliau mau bekerja baik, kita *khusnudzhon* dengan direksi. Namun kenyataannya juga sampai saat ini tidak menghasilkan apa-apa.

Saya ingin memberikan prolog sedikit bahwasanya Antara itu sebagai kantor berita nasional, lebih kepada kantor berita negara. Usia Antara sekarang sudah 82 tahun, berdiri sejak 1937. Jumlah karyawan Antara total kurang lebih ada 1.000. 600 karyawan tetap, 400 PKWT, itu di luar *outsourcing* (*driver*, staf umum, dan juga *security*).

Posisi Antara saat ini berada di bawah BUMN sejak tahun 2007 yang sebelumnya memang lembaga negara di bawah Setneg.

Antara memiliki dua pendapatan, dari komersial dan juga dari PSO. Namun dari tahun ke tahun komersialnya sangat minim. Hanya fasilitas direksinya yang tinggi. Hidup lebih besar dari PSO. PSO Antara itu untuk tahun 2020 itu kurang lebih sama dengan 2019 dari Pemerintah 160 miliar. Jadi yang dipakai untuk foya-foya rapat di hotel ya uang Pemerintah itulah.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan tadi yang pertama tentang awal masuk direksi baru. Mereka sudah melengkapi fasilitasnya. Dan di tahun 2016 sejak awal mereka masuk forum-forum pertemuan tidak lagi diadakan, yang sebelumnya dengan direksi yang sebelumnya, forum pertemuan selalu diadakan per 3 bulan sekali, atau 4 kali dalam setahun. Temu karyawan namanya. Disitu ada direksi dan juga karyawan. Disitu fungsinya adalah direksi menyampaikan segala program kerja, sosialisasi kebijakan, dan lain-lain. Tapi sejak Beliau masuk/sejak Beliau memimpin, Mediatama Suryadiningrat yang biasa dipanggil 'Dimas', Beliau mantan Pemred Jakarta Pos sebelum di Antara.

Forum pertemuan tidak pernah diadakan dengan karyawan. Lantas setelah tidak ada forum pertemuan tentu tidak pernah ada lagi komunikasi dengan karyawan terkait dengan kebijakan. Semua kebijakan dia ambil

sendiri tanpa melalui aturan yang sudah diatur di dalam PKB maupun undang-undang.

Yang ketiga, kita juga ingin menyampaikan bahwasanya di tiap tahun direksi menaikkan gajinya. Alasan mereka adalah perintah dari Kementerian BUMN. Jadi sejak 2007 Antara berubah jadi BUMN, kami/karyawan merasakan yang BUMN hanya direksinya saja.

Bapak/Ibu Pimpinan dan juga Anggota Dewan yang terhormat,

Kita hanya sebagai karyawan tetap saja seperti dahulu sebelum berubah jadi BUMN. Direksi melengkapi fasilitasnya, dan gajinya melalui perintah BUMN. Dan menggunakan uang perusahaan, bukan uang BUMN.

Lanjut setelah tahun 2016, ini mulai-mulai di tahun 2017, tahun 2017 PKB periode 2016-2018 itu sama sekali atau bisa dikatakan sebagian tidak dijalankan, tidak dipatuhi. PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang kita susun bersama dengan perusahaan itu dijalankan hanya untuk kepentingan perusahaan. Untuk kepentingan kesejahteraan karyawan itu selalu diabaikan.

Kenaikan gaji seperti contoh di dalam PKB ini, kenaikan gaji selalu kita ditarget dengan direksi hanya 5 persen per tahun, padahal di dalam PKB kita menyatakan bahwasanya manajemen wajib meninjau kenaikan gaji karyawan per tahun sesuai dengan laba perusahaan, atau minimal sebesar nilai kenaikan UMP DKI Jakarta. Itu juga tidak dijalankan oleh mereka.

Lalu ada komponen THR, ini hanya contoh saja beberapa, komponen THR kami yang sudah kita tentukan dalam PKB itu tidak sesuai pembayarannya.

Lalu pemberian penghargaan uang masa kerja kepada karyawan sudah bekerja 15, 20, 25, dan 30 tahun tidak sesuai dengan apa yang telah kita sepakati di dalam perjanjian kerja bersama, dan juga komponen dana pensiun yang memang dibayarkannya tidak sesuai dengan aturan atau Undang-Undang Dana Pensiun.

Lalu yang selanjutnya direksi yang baru ini juga tidak mau menjalankan skeep-skeep yang sebelumnya yang memang masih berlaku. Mereka menjalankan kebijakan dengan kemauan mereka. Bila belum ada aturan, mereka buat *backdate*, pokoknya yang penting jalan dulu. Itu seperti itu.

Di tahun 2017 kita sudah mempersiapkan revisi PKB untuk periode 2018-2020. Sudah dirundingkan, sudah disepakati, berita acara sudah selesaiantara tim perunding Setikat Pekerja Antara dengan manajemen, namun juga direksi tidak mau menandatangani.

Selanjutnya, jalur komunikasi serikat pekerja itu diputus. Yang selama ini dengan direksi sebelumnya kami sangat harmonis, kami sangat kompromi, kami bisa menyampaikan segala permasalahan yang terjadi di perusahaan. Dengan direksi yang hari ini mereka sangat anti dengan serikat, mereka tidak mau bicara dengan serikat. Dan beberapakali jika ada persoalan-persoalan tentang kekaryawanan kita selalu kirimkan surat permohonan untuk diskusi untuk *bepartit*, karena kita di Antara sudah memiliki wadah LKS *bepartit*, tapi tidak dihidupkan oleh direksi yang hari ini berkuasa.

Di tahun 2018 awal terpilih kembali untuk mendampingi Direktur Utama. Ada Direktur Komersial yaitu Hempi N Prajudi, Direktur Pemberitaan/Ahmad Munir, dan juga Direktur SDM dan Keuangan/Nina Kurniadewi. Sebelumnya Dirut tunggal. Sebelumnya tiga, namun di pecat satu,

tinggal tunggal. Ini masuk lagi 2018 direksi baru tiga untuk mendampingi Direktur Utama. Lagi-lagi tanpa melihat kondisi keuangan, tanpa melihat RKAP yang sudah disusun, Dirut kita membeli lagi mobil *Camry* untuk fasilitas Beliau. Artinya, untuk sekelas perusahaan BUMN yang hidupnya masih di topang oleh negara itu kehidupannya sudah seperti perusahaan BUMN *grade A* yang penghasilannya mungkin mengelola aset 67 triliun. Ini tidak.

Yang terhormat Bapak/Ibu semua,

Kita ini hidup dari PSO, dari uang negara, bantuan PSO. Kalau tidak ada PSO kita tidak bisa hidup. Karena direktur komersial kita juga tidak bisa mendapatkan pendapatan itu untuk operasional perusahaan. Ini mengganti mobil *Camry*, kelas tertinggi. Mengubah gajinya di tahun 2018 sejak Januari, menaikkan gajinya hingga 32 persen tanpa menaikkan juga kesejahteraan karyawan.

Di bulan Juli 2018 mereka melakukan perubahan struktur organisasi itu tidak disosialisasikan. Lalu membubarkan unit kerja yang memang diiringi dengan penempatan karyawan yang tidak jelas. Bahkan karyawan disuruh mencari sendiri itu tempat dia untuk bisa bekerja di beberapa departemen. Pengelola SDM juga tidak berfungsi maksimal. Penempatan karyawan juga tidak mempertimbangkan kompetensi.

Dari beberapa masalah yang terjadi di tahun 2016, 2017, dan 2018, ini memang terjadi di akhir 2018 keresahan teman-teman karyawan. Karena apa, karena yang pertama PKB tidak ditandatangani oleh direksi. Direksi dengan alasan mau menandatangani jika ada perubahan. Apa yang mau diubah oleh direksi yang kami/SP tidak sepakat. Yang mau dirubah oleh direksi adalah direksi mau menghapus pasal kenaikan gaji karyawan pertahun, mereka tidak mau ada kewajiban itu. Yang kedua, mereka mau mengurangi jumlah penghargaan Satya Lencana kepada karyawan yang sudah bekerja 15, 20, 26, dan 30 tahun, mereka mau kurangi. Banyak beberapa pasal-pasal yang mereka mau hilangkan, kesejahteraan karyawan. Namun jika mereka bicara dimana-mana, termasuk pada saat RDP dengan Komisi I, mereka cuma bicara "kita hanya mau menghapus pasal perkawinan sekantor itu dihilangkan". Kalau itu kita tidak masalah.

Kita yang masalah ini direksi mau menghilangkan kenaikan gaji karyawan. Dan ternyata memang di tahun 2018 kita tidak naik gaji karyawan, sedangkan UMP di Jakarta dan UMP dimana-mana itu semua sudah naik. Harga pasaran tenaga kerja melalui UMP itu sudah naik, tapi kita di BUMN tidak mengalami kenaikan gaji.

Lalu kita surati direksi, tidak di respon. Dua kali kita surati, tidak di respon. Lalu teman-teman karyawan memintalah kepada Serikat Pekerja Antara untuk melakukan aksi meminta untuk bertemu dengan Dirut. Kita lakukan empat tuntutan pada saat itu, yang terhormat Bapak/Ibu semua. Yang pertama kita minta kenaikan gaji tahun 2018, untuk karyawan diberikan kenaikan. Lalu kita minta juga penandatanganan PKB dilakukan. Kita minta pengangkatan untuk karyawan PKWT yang sudah bekerja lebih dari 5 sampai 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Karyawan PKWT yang dipekerjakan di Antara ini umumnya *core business*. Di jurnalis pun masih ada yang PKWT, sedangkan *core business* kita memang media/jurnalis.

Lalu kita mengirim surat kepada direksi tidak ditanggapi, kita aksi dua kali. Di tanggal 4 Desember 2018 kita aksi, di internal perusahaan tidak di respon. Lalu kita aksi kembali yang kedua di tanggal 13 Desember di perusahaan dan juga di Kementerian BUMN. Kita diterima dengan Humas BUMN, tapi sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjut dari BUMN.

Di pasca aksi inilah penderitaan karyawan mulai terealisasi. Pasca aksi 2018 di bulan Desember tanggal 28 salah satu jurnalis kita yang berstatus tenaga kerja PKWT yang harusnya sudah diangkat sebagai karyawan sesuai dengan nota pemeriksaan pengawasan ketenagakerjaan DKI, kita sudah dapatkan itu, bahwasanya mereka sudah memeriksa Antara melakukan praktek PKWT yang salah. Jadi 120 PKWT harus diangkat. Namun bukan diangkat, teman-teman pasca aksi malah diputus.

Di bulan Januari tahun 2019 diputus lagi 20 PKWT. Tidak berhenti sampai disitu, di bulan Juni tanggal 28 direksi mengeluarkan keputusan mutasi kepada pengurus Serikat Pekerja Antara yang di bulan Desember ikut aksi. Kami membawa juga salah satu pengurus yang menjadi korban mutasi dan langsung di PHK, itu Pak Tirta ada di sebelah kanan.

Dari beberapa persoalan, kenaikan gaji, penandatanganan PKB, itu sudah kita mediasikan di Kementerian Tenaga Kerja. Anjuran sudah keluar dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, namun diabaikan oleh direksi. Bahkan kementerian pun mengeluh dengan kita para pekerja. Penyakit Direksi BUMN ialah tidak patuh terhadap keputusan atau anjuran atau apapun dari Kementerian Tenaga Kerja. Mereka hanya patuh kepada dewanya, yaitu Menteri BUMN. Mereka hanya bilang "anjuran ya silakan saja, saya tidak mau menjalankan".

Itu yang kenaikan gaji dan PKB. Yang mutasi dan pemutusan kontrak karyawan PKWT kita juga mediasikan/kita juga perselisihkan di Disnaker DKI Jakarta. Anjuran keluar dari Disnaker, tidak juga dijalankan oleh direksi. Hingga kita menuju ke PHI. Saat ini kita sedang sidang, ada tiga sidang di PHI. Yang satu sudah putus soal PKWT, yang mutasi masih agenda kesaksian.

Bapak/Ibu yang terhormat,

Kalau boleh saya cerita terkait dengan yang mutasi pengurus Serikat Pekerja Antara, saya boleh sampaikan bahwasanya.

KETUA RAPAT:

Yang di hubungan industrial tadi yang PKWT sudah diangkat?

KETUA SERIKAT PEKERJA LKBN ANTARA:

Yang PKWT di PHK.

KETUA RAPAT:

Di-PHK ya. Sudah putus?

KETUA SERIKAT PEKERJA LKBN ANTARA:

Masih di tahap pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mutasi pengurus juga sudah kita mediasikan. Keluar dari Disnaker anjuran bahwasanya perusahaan atau manajemen untuk mempekerjakan kembali, mutasinya dibatalkan. Namun bukan dibatalkan, malah teman-teman diberikan surat keputusan PHK sepihak dari perusahaan.

Manajemen hari ini tidak mau berkomunikasi. Mereka hanya memberikan surat mutasi, surat PHK. Tidak ada sedikitpun kita minta *bepartit* dengan mereka diterima.

Di bulan Agustus/sekitar bulan Agustus tahun 2019 lagi-lagi manajemen melakukan PHK massal kepada 55 karyawan yang modusnya sama dengan apa yang dilakukan kepada teman-teman Indosat. Cuma berbeda. Kalau teman-teman Indosat dibawa ke hotel, disampaikan di dalam kamar hotel. Kalau kami hanya dikumpulkan di aula, kawan-kawan kami/karyawan-karyawan kami dikumpulkan di aula. Lalu dipanggil satu-satu ke dalam sebuah ruangan yang didalamnya sudah ada kepala divisi dari teman-teman tersebut.

Kepala divisi kami dalam menyampaikan itu sama seperti radio tape yang kosong di isi *flashdisk*. Jawabannya sama bahwasanya, kurang lebih ilustrasinya begini yang terhormat Bapak/Ibu semua.

KETUA RAPAT:

Yang 55 orang ini pegawai tetap?

KETUA SERIKAT PEKERJA LKBN ANTARA:

Pegawai tetap pusat dan daerah.

Itu satu-satu orang dipanggil, ada yang berdua, ada yang bertiga, di panggil, disampaikan bahwasanya anda di PHK. Di kemas dalam bentuk *golden shake hand* namanya, jabat tangan emas. Itu anda di PHK dengan kompensasi sekian.

Tadi saya mendengar di Indosat sampai 600 juta. Kalau di Antara paling tinggi 250 juta. Yang lainnya ada yang 100, 112, 150. Itupun diiringi dengan isak tangis karyawan, karena di paksa. Di dalam ruangan itu hanya disampaikan "Anda di PHK, sekarang Anda tandatangan, atau kita kasih waktu 2 hari tandatangan. Kalau Anda tidak ambil atau tidak terima dengan keputusan perusahaan Anda tetap akan di PHK, tapi tidak mendapatkan apa-apa". Kalau Indosat tadi tiap hari berkurang. Kalau di Antara "Kalau Anda tidak terima, Anda besok tetap di PHK dan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda mau melawan, mau melakukan gugatan silakan saja". Ditakut-takutin itu. "Anda akan tidak di gaji, selama Anda bersidang tidak di gaji, Anda mau hidup, makan, dengan apa?" Jadi semua pada takut itu, "Kalau Anda tidak terima Anda bakal di PHK".

Jadi kami curiga kalau melihat modusnya di beberapa perusahaan BUMN, Indosat, Kami/Serikat Pekerja Antara, beberapa teman-teman yang lain BUMN, kok modus-modus seperti ini dilakukan sama? Apakah ini ada konsultannya? Itu mungkin jadi masukan juga buat Bapak/Ibu semua, apakah

di ketenagakerjaan Indonesia ini ada konsultan untuk khusus melakukan PHK?

Karyawan tidak boleh bediskusi menjawab, karyawan tidak boleh bertanya macam-macam. "Pokoknya Anda di PHK. Kalau tidak, kita tidak bayar. Kalau mau konsultasi kita siapkan konsultan untuk berkonsultasi". Ternyata ada yang melakukan konsultasi dengan konsultan. Saya pikir konsultannya hebat menyampaikan inovasi bekerja di tempat lain lebih baik, tidak. Cuma "Ya sudah Anda terima saja, kan ada Gojek di luar, ada Grab, Anda bisa ikut *ojek online*". Inikan menurut saya konsultan yang 'konyol'. Dan itu dibayar ratusan juta hanya untuk menyampaikan "Anda kalau dipecat dari sini bisa ada *ojek online*, silakan bisa ikut disana". Itu dibayar ratusan juta dari perusahaan.

Di tahun 2019 juga manajemennya melakukan likuidasi unit kerja yang selama ini unit kerja tersebut bisalah dikatakan sebagai *branding* Perum LKB Antara. Disitu ada fungsi edukasi, fungsi pendidikan bagi pewarta-pewarta foto, itu di *brede*/dihilangkan. Modusnya hanya karena yang bekerja di divisi itu, memang ada saya selaku Ketua Serikat Pekerja Antara, dan juga ada Ibu Nana/Dewan Penasehat Serikat Pekerja Antara.

Di tahun 2020 sudah keluar lagi SK PHK massal untuk karyawan, program mutasi lagi untuk karyawan ke beberapa kota di Indonesia, yang memang modusnya lagi-lagi sebenarnya lebih kepada memberangus Serikat Pekerja Antara, karena yang dilakukan mutasi dan PHK itu umumnya orang-orang yang ikut aksi di dalam Serikat Pekerja Antara, aksi di manajemen.

Dari beberapa yang saya sampaikan, saya ingin menyampaikan, yang terakhir di tahun 2020 Direksi mengangkat seorang GM itu dari luar. Yang pertama modusnya adalah diangkat sebagai konsultan.

Jadi Direksi saya ini hebat. Dia ditunjuk sebagai direksi, pegang dua jabatan, di gaji 200 juta, SDM dan keuangan. Beliau lalu meng-*hire* konsultan SDM dan konsultan keuangan, dari disitulah dia bekerja. Kedua konsultan itu juga bawa anak buahnya lagi, dibayar semua oleh perusahaan. Maksudnya orang luar bukan karyawan Antara, tapi bukan orang asing. Setelah menjadi konsultan beberapa bulan, lalu hari ini di angkat sebagai kepala divisi atau *general manager* di perusahaan, dimana jabatan *general manager* di Antara itu orang nomor dua setelah direksi, jabatan karir tertinggi di perusahaan. Sedangkan jabatan direksi kan jabatan politis yang di pilih oleh kementerian. Ini di dalam PKB pun sudah kita cantumkan, sudah kita masukkan, bahwasanya jabatan mulai dari Asmen, Manajer, sampai dengan GM, itu tidak boleh di isi dari orang luar. Adapun jika memang dibutuhkan keahlian-keahlian khusus atau masukan-masukan dari luar hanya sebagai konsultan yang diberikan waktu 3 sampai 6 bulan. Setelah itu kontrak diselesaikan. Bukan diangkat menjadi pejabat teknis di dalam perusahaan. Ini juga menyakiti teman-teman karyawan perusahaan dengan gaya-gaya kepemimpinan direksi kita hari ini.

Dari beberapa yang saya sampaikan saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwasanya yang pertama manajemen Antara ini menganggap Serikat Pekerja Antara bukan lagi mitra, sehingga setiap keputusan terkait karyawan tidak ada sosialisasi dan pertimbangan kepada Serikat Pekerja Antara. Di dalam PKB itu dijelaskan bahwasanya segala hal tentang ketenagakerjaan yang akan dilakukan dalam perusahaan itu harus dibicarakan dengan serikat pekerja.

Yang kedua, pelanggaran PKB terus menerus dilakukan oleh manajemen. Terlebih dalam hal kesejahteraan karyawan. Tidak sama sekali PKB dipergunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan.

Lalu yang selanjutnya, direksi sangat mengabaikan anjuran-anjuran dari lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan juga Disnaker. Dibuktikan dengan adanya 6 anjuran yang kami dapatkan dari kementerian dan juga dari Disnaker itu semua menurut kami/Serikat Pekerja Antara yang anjurannya berisi keputusan yang berkeadilan lah, tapi direksi tidak menjalankan. 6 anjuran dan 1 nota pemeriksaan tidak dijalankan/diabaikan oleh direksi.

Lalu praktek-praktek yang diterapkan oleh manajemen terhadap karyawan memang tidak lagi berdasarkan ukuran-ukuran yang wajar, namun lebih banyak kepada suka dan tidak suka. Seperti dalam hal pemberian bonus jasa produksi, kita semua karyawan diberikan maksimal dua. Itupun dua yang kita dapatkan tidak lagi sesuai angkanya seperti yang di direksi sebelumnya. Ada yang dikurang-kurangi disitu.

Lalu kepada 40 orang yang memang disukai oleh direksi, mohon maaf kita sampaikan sebagai penjiat, ini diberikan bisa lebih dari 2, 4, bahkan bisa sampai 6, tanpa adanya ukuran apapun, tanpa ada indikator ukuran pemberian itu sendiri.

Selanjutnya, manajemen hari ini juga tidak menggunakan PKB dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap tindakan yang terkait dengan karyawan. Jadi mereka bikin saja keputusan sendiri tanpa mengacu itu.

Yang ingin saya titik beratkan adalah, jika perusahaan plat merah saja tidak patuh terhadap undang-undang atau regulasi negarai, bagaimana kita berharap perusahaan-perusahaan asing/perusahaan-perusahaan swasta, mau untuk mematuhi regulasi yang ada di negara kita Republik Indonesia.

Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan hari ini, yang terhormat Pimpinan dan juga Anggota Dewan DPR RI Komisi IX. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari pengurus kami.

Dari saya/Ketua Umum Serikat Pekerja Antara terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Terima kasih Mas Gofur.
Ada tambahan dari yang lain?
Silakan perkenalkan dari mana.

PEGAWAI PHK ANTARA:

Terima kasih Pimpinan.

Mungkin sebagai ilustrasi kejadian yang sama, tapi berbeda dengan kawan-kawan dari Indosat, saya ingin mengutip salah satu kutipan dari Bung Karno yang terkenal: *"Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri."*

Ini terjadi di Antara, Pak. Kalau di Indosat itu yang dihadapi orang asing. Kami di Antara ini menghadapi saudara sendiri, sebangsa sendiri, yang ternyata sebangsa sendiri pun bisa tega memutus rezeki kawan-kawan sendiri, saudara-saudara sendiri dengan PHK dengan mengabaikan peraturan, mengabaikan undang-undang. Bahkan dalam satu forum kami mendengar ada salah satu direksi yang bilang bahwa PKB itu mengganggu program kerja perusahaan katanya. Kok bisa PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang dilindungi oleh undang-undang/diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan di dalam peraturan pemerintah pembentukan Perum LKBN Antara mewajibkan ada PKB, bisa-bisanya direksi mengatakan itu mengganggu program. Menurut saya itu sebuah bentuk pelecehan terhadap peraturan pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ada rekamannya?

PEGAWAI PHK ANTARA:

Ada Pak, ternyata ada.

Jadi Direksi Antara sendiri melecehkan tidak hanya undang-undang, tapi juga pemerintah sendiri. Undang-undang dalam hal ini tentu ada bagian terhadap Anggota DPR, karena undang-undang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah. Tapi peraturan pemerintah tentang pembentukan Perum LKBN Antara yang itu adalah domainnya pemerintah sendiri pun dilecehkan Pak.

Kami sangat berterima kasih Komisi IX bisa menanggapi aspirasi kami dengan mengundang kami kesini. Kami berharap aspirasi kami ini bisa ditindaklanjuti mungkin nanti seperti apa. Kami berharap yang terbaiklah yang akan terjadi pada Antara.

Sebagai kantor berita milik negara, sebagai badan usaha milik negara, sudah seharusnya, tadi Ketua kami pun sudah menyampaikan, sudah seharusnya Antara juga menjalankan undang-undang. Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan penyerta modal asing bisa mentaati undang-undang di Indonesia kalau BUMN sendiri yang *notabene* adalah perusahaan milik negara tidak bisa menaati undang-undang.

Mungkin itu saja dari saya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada yang lain?

Silakan Ibu.

Yang singkat-singkat ya.

PEGAWAI ANTARA:

Terima kasih kepada Anggota Dewan yang terhormat.

Saya harus sampaikan, kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bahwa akhirnya teman-teman kami bisa diterima dalam pertemuan yang sangat penting ini.

Setelah yang disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja Antara tadi yaitu adalah beberapa hal yang terkait dengan keputusan mutasi dan PHK beberapa karyawan Kantor Berita Antara, maka kami harus sampaikan juga yang pertama-tama adalah begini:

Sejak tahun 2007 Antara memang menjadi BUMN, ada di bawah BUMN. Sebelumnya itu adalah lembaga kantor berita nasional yang pada saat itu langsung ada di bawah Sekneg, kemudian pembinaannya oleh Departemen Penerangan (saat itu Kominfo), kemudian juga kepegawaiannya juga BAKN waktu itu. Kemudian pemimpin umumnya diangkat oleh presiden langsung. Kemudian tahun 2007 berubah, karena memang kantor berita itu harus berbentuk badan hukum. Kemudian Antara mengambil posisi, sebelumnya memang sudah disampaikan oleh teman kami bahwa PHK dan mutasi itu adalah keputusan yang menyakitkan untuk seluruh anggota serikat pekerja dan karyawan Kantor Berita Antara. Tapi ada hal-hal lain yang akhirnya kami harus sampaikan, tidak hanya sisi itu saja, kami juga menyoroti bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh direksi di dalam mengelola Kantor Berita Antara itu seringkali tidak GCG. Kalau sebagai BUMN harus mempraktekkan tindakan GCG, maka itu tidak dilakukan.

Saya harus sampaikan informasi bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh direksi seringkali adalah keputusan yang sembrono. Sembrono dalam arti tanpa perencanaan. Kalau dalam hal mutasi, kemudian PHK, selalu disebut bahwa direksi sudah melakukan pemetaan, maka hal itu tidak pernah dilakukan. Kalau ada keputusan misalnya pembubaran satu unit atau kemudian mengubah struktur organisasi Antara, karyawan-karyawan yang di mutasi itu mereka tidak mempunyai *job desk*, sehingga ada karyawan yang akhirnya diam dan tidak melakukan apapun, karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Bahkan kemudian kalau misalnya mereka bertanya kepada atasan sebelumnya, mereka juga tidak tahu apa-apa.

Kemudian yang kedua, keputusan sembrono itu karena juga tidak melalui sosialisasi sebelumnya, baik rencana maupun surat keputusan yang sudah jadi. Dan kemudian akhirnya tidak ada solusi. Solusinya sama sekali tidak damai untuk karyawan Antara, dan itu seringkali menyakitkan. Karena banyak sekali keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.

Dan ini yang seringkali kami harus bilang bahwa ini tidak GCG. Salah satu contohnya adalah pembubaran salah satu divisi yang tentu saja penting bagi Antara, karena itu membawa sejarah Antara, yaitu GFC. Mungkin Bapak/Ibu sudah mendapatkan terkait dengan tanggapan dari Oscar Motuloh/Fotografer Antara bagaimana dia merasa bahwa sejarah Antara itu seperti dibalikkan dan seperti tidak mempunyai arti apa-apa untuk direksi-direksi yang saat ini.

Dan kemudian terkait dengan hal-hal lain yang tidak GCG itu bisa dibuktikan dalam temuan BPK/audit BPK yang sudah dilakukan sejak bulan September sampai bulan Nopember. Ada 12 temuan BPK yang menunjukkan bahwa Direksi Antara tidak GCG. Mungkin tidak kita sampaikan, tapi mungkin bisa diinformasikan kemudian. Ada 12 temuan, dan itu sudah saya sampaikan kepada BUMN. Sebegitu parahnyanya. Jadi keputusan PHK dan keputusan

mutasi karyawan itu adalah bagian dari bagaimana direksi banyak sekali tidak melakukan hal-hal yang seharusnya sesuai aturan main kantor berita, dan juga tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Bahkan juga tidak GCG menurut aturan manapun. Itu yang terjadi.

Jadi saya kira saya hanya menambahkan itu saja Pak. Mudah-mudahan bisa mewarnai apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu.

Ada yang lain?

KETUA SERIKAT PEKERJA LKBN ANTARA:

Ijin, yang terhormat Pimpinan, ingin menambahkan sedikit saja.

Kami dari Serikat Pekerja Antara berjuang untuk memperbaiki perusahaan ini dan juga nasib para karyawan. Sudah kemana-mana, yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan semua. kami sudah ke BPK. Sudah dilakukan audit, hasilnya seperti yang disampaikan tadi 12 temuan ketidak GCG-an. Bahkan diperintahkan untuk mengembalikan kenaikan gaji direksi dan lain-lain. Artinya, direksi banyak melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Kita sudah ke KPK, sudah kita sampaikan. Namun sampai hari ini saya juga tidak mengerti KPK juga tidak berjalan. Saya tidak mau berspekulasi apa-apa terkait KPK, namun sampai saat ini laporan kami juga *mandeg* saja seperti itu.

Kita sudah ke DPR secara politik, kita sudah sampaikan ke Komisi I, VI, dan juga IX. Komisi I sudah memanggil direksi untuk RDP. Komisi VI *alhamdulillah* beraudiensi dengan kami.

Selain itu jalur hukum sudah kami tempuh. Mediasi, Kemnaker, Disnaker, dan juga PHI, sudah kami tempuh. Ke Pimpinan DPR pun sudah kami tempuh. Namun sepertinya masih proses semua. Saya tidak tahulah ada kekuatan apa di balik direksi ini, saya juga tidak mau berspekulasi tentang itu.

Namun kami hanya berharap juga dari hasil pertemuan ini, mungkin dari Bapak/Ibu semua Komisi IX DPR RI juga bisa menyampaikan atau memberikan kesimpulan yang baik kepada Menteri BUMN untuk mengevaluasi kinerja direksi yang ada saat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada perwakilan dari yang ter-PHK? Silakan.

PERWAKILAN PHK ANTARA:

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Nama saya Tirta Wiguna. Saya sekitar 24 tahun bekerja di Perum LKBN Antara. Jabatan terakhir saya Asmen Perpajakan. Tanpa ada sosialisasi dan pembicaraan awal tiba-tiba saya mendapatkan surat mutasi ke Kalimantan Tengah, didalamnya yang menyebutkan untuk pengembangan biro. Tapi kondisinya saya disana demosi menjadi staf fungsional administrasi keuangan dan pemasaran. Setelah saya konfirmasi kepada kepala bironya disana, itupun saya akan ditaruh di kabupaten, bukan di kotanya Kalimantan Tengah. Dan saya konfirmasi ke Dirut Perum LKBN Antara, itu dia pun tidak bisa menjelaskan lebih jelas ke saya bahwasanya alasan saya dipindahkan itu untuk apa. Karena secara kinerja saya tidak ada SP, tidak ada kesalahan, tapi kenapa demosi, dia tidak bisa jawab. Saya konfirmasi juga ke Ibu Dina selaku Direktur Keuangan, dia juga tidak bisa menjelaskan. Hanya yang ditekankan ini untuk pengembangan biro. Dari situlah saya akhirnya minta di advokasi untuk ke serikat pekerja, kita adakan mediasi ke disnaker, sampai dengan sekarang ini sudah di PHI, sudah mulai kesaksian.

Mungkin itu saja kronologis yang saya alami.
Terima kasih.

PERWAKILAN PHK ANTARA:

Menambahkan sedikit, Pimpinan, maaf.

Mungkin ada yang kurang disampaikan Pak Tirta. Mungkin mau merendah atau bagaimana. Salah satu pendiri Antara adalah Pandu Kartawiguna, pejuang yang juga ikut mendirikan Kantor Berita Antara. Pak Tirta Wiguna ini adalah cucu Beliau. Salah satu cucu pendiri Antara, 24 tahun kerja di Antara, dimutasi tanpa alasan yang jelas. Yang kita duga kuat alasannya karena aktif di serikat pekerja, karena ikut berdemo, dan akhirnya di PHK Pak.

SEKJEN ASPEK INDONESIA:

Dari Aspek Indonesia, mereka adalah anggota dari Aspek Indonesia, sedikit menambahkan saja sedikit beberapa hal, mohon ijin.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak sebelumnya.
Silakan Pak.

SEKJEN ASPEK INDONESIA:

Terima kasih Pimpinan.

Nama saya Sabda Pranawajati, saya Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), dimana Serikat Pekerja Antara dan Serikat Pekerja Indosat ini berafiliasi ke Aspek Indonesia.

Salam hormat dari Ibu Mirah Sumirat selaku Presiden Aspek Indonesia yang hari ini masih ada kegiatan di Bogor. Sedianya Beliau sangat ingin sekali hadir untuk bisa mengawal langsung kasus dari anggotanya, tapi Beliau berhalangan hadir.

Terkait dengan kasus SP Indosat, Bapak/Ibu Pimpinan dan juga Anggota Dewan yang kami hormati, bagi kami di Aspek ini menjadi persoalan serius, karena menurut kami ini adalah proses PHK paling brutal, paling tidak beradab. Disini ada ibu-ibu juga yang Anggota Dewan bisa merasakan bagaimana anggota kami yang tadi disamping saya ini masuk ke ruangan hotel sendirian, hanya dengan laki-laki didalamnya, ini satu proses yang paling brutal. Dan ini dilakukan oleh perusahaan asing di Indonesia.

Terkait dengan Indosat kami berharap dari Pimpinan Komisi IX bisa memanggil Direksi PT Indosat dan memanggil teguran keras kepada mereka untuk kemudian mempekerjakan kembali seluruh pekerja yang di PHK. Karena prosesnya sangat intimidatif Pak. Bagaimana mungkin seorang perempuan kemudian bisa bertahan melakukan pembelaan diri di dalam satu kamar. PHK kalau tidak mau terima maka terus akan berkurang haknya, inikan intimidasi sekali. Tidak ada mungkin yang sekuat Ibu Vida melakukan perlawanan di dalam.

Jadi sekali lagi, Aspek Indonesia dan KSPI menaruh perhatian sangat serius terhadap kasus ini, dan meminta kepada Komisi IX memberikan teguran keras pada Direksi Indosat, memanggilnya, dan juga mempekerjakan kembali seluruh pekerja yang di PHK sepihak.

Kedua terkait dengan SP Antara. Saya senang disini ada Mbak Ning sahabat lama jugayang pada periode yang lalu kita sama-sama mendobrak di BUMN.

Tapi ternyata PR-PR kita belum selesai, Mbak Ning. Kita belum mendirikan Gebyar BUMN namanya, melawan arogansi direksi. Hampir semua direksi BUMN melakukan pola yang sama, mengintimidasi, melakukan, kemudian mempekerjakan pekerja *outsourcing* tanpa sesuai undang-undang, kontrak kerja yang berulang-ulang, dan sebagainya.

Ini SP Antara juga menjadi aset yang sangat penting. Tidak saja buat pekerjaanya, tapi juga buat bangsa ini Pak. Ini LKBN Antara sama seperti kalau di Jepang NHK kali Pak, kantor-kantor berita milik nasional. Jepang Kyodo, seperti itulah.

Kemudian juga saya ingin membawa pesan juga dari Ibu Mirah, karena Ibu Mirah juga terkena PHK sepihak dari Direksi PT Jalan Tol..... Di PHK sepihak tanpa melalui proses hukum, padahal dalam PKB nya, dalam Undang-Undang 13 sudah dinyatakan bahwa PHK hanya dapat dilakukan jika ada putusan pengadilan. Instruksi dari PT Jasa Marga selaku induk usahanya kemudian mereka mem-PHK Ibu Mirah secara sepihak. Ini PR-PR besar.

Kemudian kami kemarin dua minggu yang lalu mendirikan Aliansi Pekerja BUMN Bergerak. Salah satunya ada Serikat Pekerja Kereta Api. Ketua umumnya juga sama di kriminalisasi dan di PHK sepihak.

Besok tepatnya hari Rabu tanggal 27 kami akan menggelar aksi demo. Sore di hari Kamis akan menggelar aksi demo di Kantor Menteri BUMN terkait dengan beberapa masalah ketenagakerjaan. Mohon dukungan dari Bapak/Ibu sekalian.

Sekali lagi terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih tamu-tamu terhormat kami.

Kemudian selesailah penyampaian dari kedua serikat pekerja ini, baik dari Indosat maupun juga dari Antara. Sekarang saya persilakan teman-teman Anggota DPR RI. Yang pertama tadi dari sebelah kiri ada Ibu Ribka. Siap-siap nanti dari sebelah kanan, Ibu Intan Fauzi.

Silakan Ibu Ribka, pejuang buruh kita.

Hidup Buruh!

F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING):

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Teman-teman Komisi IX, teman-teman para tamu dari Indosat dan Antara,

Hidup Buruh!

Terima kasih sudah hadir di tempat ini.

Sabda rupanya masih ingat kita dulu membuat panja *outsourcing* BUMN yang sebetulnya tinggal di realisasi saja. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sampai kita jemput. Walaupun dia hatinya juga sudah hati kuda atau hati apa itu. Kita jemput pakai ojek dulu.

Jadi kalau sekarang pun saya juga usul sama Pimpinan Komisi IX jemput saja Erik Tohir kesini. Ini BUMN perusahaan negara. Kalau Indosat saya tidak urusan lah punya asing, punya negara, semuanya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 'Negara berkewajiban memberikan pekerjaan memberikan pekerjaan pada warganegaranya dengan rasa aman dan nyaman'. Bukan untuk dipecah dan di intimidasi. Apalagi tadi kalau seorang Ibu masuk ke dalam hotel saya sudah bisa bayangin, itu salah satu bentuk intimidasi, bentuk teror itu. Jadi bukan main-main.

Saya mau bertanya pada Indosat maupun teman-teman Antara. Dua hal biasanya perusahaan kayak begini ini serikat pekerjaannya pasti ada dua. Ada perusahaan yang dipelihara sama pengusahanya atau manajemen yang pihaknya pengusaha. Pasti kalau kita datengin yang dihadirkan yang *manut* ini, yang SP, yang pro, yang ada di ketiak pengusaha/manajemen. Jadi yang tidak yang suka demo, suka kritik, suka apa, nanti lama-lama dirumahkan, *union busting*, lama-lama di mutasi, lama-lama di pecat tanpa memberikan hak-haknya.

Tadi lucu lagi, haknya ada tawar menawar ini. Dalam beberapa jam tidak ada jawaban turun harganya, model mana ini. Mumpung lagi isunya *omnibuslaw* lagi yang juga tidak tahu ini kepentingannya kepentingan investor, apa kepentingan buruh, apa kepentingan apa, kita belum tahu ini. Juga sebetulnya bisa diraba, teman-teman pasti bisa meraba, nasib buruhnya lebih kacau lagi.

Jadi teman-teman sekalian, buat dua kelompok atau dua serikat pekerja ini sama pertanyaan saya, ada berapa SP disitu, yang PHK sudah berapa orang, yang *outsourcing* berapa orang, yang dirumahkan berapa orang, terus sudah ke Kemenaker belum, sudah ke dinas belum.

Nanti kalau ke Depnaker langsung dibilang begini “Dinas dulu”, bahasa orang Depnaker ini kadang-kadang “ke Dinas dulu”. Terus ada juga “ke komisi lain yang terkait”.

Tadi ada Angkasa Pura. Ini kadang-kadang sama di DPR, ini rumah rakyat ini, tapi kadang-kadang berkait dua komisi kan, saya pernah mengalami, mudah-mudahan sekarang tidak ini, periode ini tidak, mudah-mudahan wakil rakyatnya semua orang baik yang di pilih rakyat betul. Jangan kalau lagi mau pemilu baik-baikkannya datang ke buruh, karena tahu buruh paling banyak suaranya. Terus nanti giliran sudah jadi lupa sama buruhnya.

Di DPR juga aneh. Misalnya buruh mandiri, di pecat, persoalan buruhnya kesini. Baru keluar di tangkap sama Komisi XI misalnya 404 orang. Saya pernah mengalami ini. Kalau tidak salah Pak Ansory masih ingat dulu ditawari “*Elu* mau selesai urusannya, kumpulin 5 juta satu orang selesai urusanmu”. Saya di WA “Mbak Ning, bagaimana, kita lagi di PHK disuruh ngumpulin 5 juta perorang”. Saya marah, kumpulin semua pimpinan Komisi IX “siapa yang minta duit”. Tidak ada, tidak tahunya komisi lain.

Angkasa Purat, kita datangi ke Angkasa Pura dulu mau lebaran “tidak boleh ada PHK”. Gagah kita kan. Komisi IX “tulis itu, tidak boleh”. Datang Komisi V kesana, dia bilang “kau boleh punya Komisi IX, tapi kita juga punya Komisi V”. Jadi kadang-kadang seperti itu kita repot juga. Ini supaya teman-teman tahu, mudah-mudahan sekarang ini tidak terjadi begitu. Saya sampai *gelut* sendiri sama teman separtai saya. Yang satu *backup* manajemen, yang satu *backup* buruh, kan kacau. Karena yang sana mengadu ke komisi yang ini, yang satu mengadu ke ini. Ini sebagai bayangan, saya sempat melamun. Seperti *outsourcing* BUMN, saya dulu malah usul kepung saja itu gedung BUMN. Kalau salah satu SP saja mengirim 100 orang, kali sekian SP, berapa ribu. Targetnya target maksimal, kalau belum diloloskan itu tidur disitu. Saya mau tidur sama-sama disitu, betul.

Ini persoalannya inikan negara harus bisa menjamin memberikan pekerjaan. Ini sudah kerja 20 tahun. Saya dengar tadi Ibu itu ada yang 10 tahun tidak salah tidak apa. Tidak muluk, yang penting anaknya bisa sekolah, bisa makan. Masih tidak ada salah tidak ada apa di aniaya, diapain. Ngapain capek-capek datang kesini kalau tidak ada masalah.

Jadi usul konkret saya begini, Pimpinan. Dulu kita pernah buka, Komisi IX ini sudah kayak balai pengaduan, jadi seperti Departemen Sosial. Pak Ansory pasti masih ingat. Panggil manajemennya kesini. Kalau nanti mentok juga, bikin surat kepada Presiden melalui Pimpinan DPR supaya menghadirkan Menteri BUMN datang kesini menyelesaikan ini.

Saya dulu bikin surat ke Pak SBY supaya bisa di Dahlan Iskan datang kesini. Tadinya juga menghindar ini, menghindar itu. Datang akhirnya bersama Menteri Tenaga Kerja, kita selesaikan panja itu. Kalau tidak begitu tidak selesai.

Pertama kita coba dulu, nanti kan pasti manajemennya nyuruhnya dia tidak berani datang. Yang datang anak buahnya atau apanya, stafnya, “oh ya kami sampaikan nanti”, tidak ada jawaban kan, “kami sampaikan”. Tidak bisa eksekusi. Antara juga begitu, nanti pasti “kami sampaikan”. Kita maunya yang langsung yang bisa eksekusi saat itu. Atau kita *on the spot* kesana, jalan yang kedua. *On the spot* kita datangi, pasti dia lari. Makanya jangan *woro-woro*. Kadang-kadang kita mau datang juga gaya-gayaan Anggota DPR

kesana datang pakai *nguwing-nguwing*, sudah lari duluan itu. Yang di depan, jagoan-jagoan bayaran, preman-premaninya itu yang di depan.

Pernah Indosiar/wartawan di pecat dengan begitu saja. Kita datangi kesana manajemennya lari. Yang menemui kita jago pukulnya semua. Jadi ada dua kemungkinan, kita panggil manajemennya atau surat minta Pak Erik Tohir datang, atau kita *on the spot* kesana. Ini karena mau reses ini, yang mana lebih cepat. Besok masih ada waktu satu hari. Ini persoalan perut ini. Teman-teman buruh ini perasaan teman-teman ini kalau sudah datang ke DPR ketemu namanya wakilnya, dan itu manusiawi, sudah merasa *uneg-uneg*-nya itu 90 persen sudah disampaikan. Belum lagi ditanya sama teman-temannya disana "bagaimana ceritanya?". Padahal nanti masih panjang urusannya ini. Yang paling cepat apa ini dari tiga ini? Kita musti cepat, karena hari apa kita sudah tutup masa sidang. Kalau bisa besok panggil, atau *on the spot*. Kalau menteri tidak mungkin, karena bikin surat ke Pimpinan DPR dulu pakai waktu. Pimpinan DPR ke Presiden, baru presidennya mengizinkan tidak ini menterinya dipanggil kesini. Saya juga ingin tahu juga ini Erik Tohir bagaimana kalau ngomong, saya juga belum tahu. Saya kan cuma tugasnya memenangkan Jokowi saja. Sudah menang kita sudah susah komunikasi. Jadi tugas saya menangan saja.

Jadi kayak begitu, jadi itu usul konkrit saya, Pimpinan. Kalau urusan nasib/perut sudah jangan ditunda-tunda lah. Ini urusannya apalagi ini mau lebaran, mau masuk anak sekolah, ini sudah benar-benar yang sangat memprihatinkan, darurat. Kita mesti pikirkan teman-teman ini supaya cepat terselesaikan. Paling tidak ada harapan itu tadi, dipekerjakan kembali. Itu terserah teman-teman bisa memilih. Kalau masih nyaman ya dipekerjakan lagi. Kalau tidak, hak-haknya diberikan sesuai undang-undang, kalau sekian tahun diberikan penuh sesuai dengan aturan Undang-Undang 13/2003. Tidak ada sekian jam turun, jawaban nunggu sekian turun, tidak ada. Diberikan sesuai dengan Undang-Undang 13/2003.

Saya rasa begitu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Ribka, boleh sedikit nyambung?

Saya dengar ini itu dikasih melebihi undang-undang itu. Jadi lucu lagi ini, dikasih melebihi undang-undang biar mau di PHK. Tapi nantilah, pokoknya terima kasih Mbak Ning.

Silakan Ibu Intan, siap-siap Pak Imam Suroso.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Yang terhormat, Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX,
Ketum/Sekjen Serikat Pekerja Indosat, LKBN Antara, juga dari Asosiasi Pekerja (Aspek),

Alhamdulillah siang hari ini, maaf kalau tadi kami terlambat, karena kami memang sidak dulu ke RSCM pasca banjir. Saya sebetulnya prihatin di perusahaan terbuka. Indosat inikan sudah Tbk/perusahaan terbuka, kemudian Perum Antara. Dan baik Indosat dan Antara ini bicara telekomunikasi/kantor berita resmi pemerintah, masih terjadi PHK yang kalau tadi dari uraiannya tentu ada ketidakpuasan. Bagaimana kemudian di perusahaan-perusahaan lain. Saya menganggap bahwa kalau perusahaan terbuka pasti sudah ada keterbukaan informasi, kemudian sudah ada aturan-aturan yang jelas dari Bapepam dan lainnya. Antara juga begitu. Kemudian juga Antara disitu gudangnya wartawan-wartawan senior. Apalagi kemudian yang di angkat menjadi dirut adalah wartawan senior dari media besar, jadi harusnya paham bagaimana kehidupan wartawan.

Tapi kita tahu juga di media-media lain pun mungkin hal yang sama terjadi. Karena biasanya dimulai dengan kontrak kerja, dari mulai reporter seterusnya-seterusnya-seterusnya, jadi mereka bisa kapan saja kemudian itu memutuskan kontrak.

Mengenai Indosat ini kalau tadi dari uraian Ibu Roro memang artinya di hotel yang ada tempat tidur dan lainnya tidak layak. Tentu prosedur tidak seperti itu. Hubungan industri antara pekerja dan pemberi kerja formalnya ada di kantor, itu domisil yang sangat jelas. Belum lagi cara-caranya yang artinya tentu itu memang dimaksudkan tekanan. Saya ingin tahu berapa banyak secara total karyawan yang kemudian di PHK massal tersebut, karena tidak terurai disini. Kemudian yang kedua, nominal yang ada di dalam tabel tadi apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, karena itu bisa menjadi *dispute* lagi kalau memang sudah sesuai dan diterima/ditandatangani, walaupun proses penandatanganan itu tidak sesuai.

Kemudian apakah sudah ada tahapan yang dilalui? Kan kita tahu Undang-Undang 2/2004 Hubungan Industrial (PHI), dari mulai mediasi, konsiliasi, dan seterusnya sampai dengan pengadilan (PHI). Dari Antara juga artinya dari keseluruhan saya sudah mendengar. Kalau kita bicara ke pengadilan ujungnya, karena itu memang sudah masuk tahap mediana sudah ada, ke Kemenaker, Dinas, dan sebagainya, tahapan sudah dilalui, pasti akan ada *dispute* disitu, artinya apa yang menjadi alasan mereka untuk kemudian mem-PHK dan sebagainya. Walaupun tadi sudah diuraikan mutasi dan sebagainya. Tapi kemudian kan harus di pegang lagi oleh karyawan apakah mutasi itu kemudian prosedurnya benar, lalu dijalankan, dan sebagainya.

Secara umum tentu kami disini, apalagi kalau tadi Ibu Ning lebih konkrit, tapi inikan bicara keputusan politis apa yang ada disini, tentu tahapan-tahapan itu juga sudah sampai mana/sejauhmana yang sudah dilakukan, sehingga ada dasar. Karena pegangannya tentu kembali lagi kepada prosedur dan undang-undang.

Dan kami perlu menyikapi juga semua apa yang sudah dipaparkan ini pada tahapan nantinya pembahasan *omnibuslaw*. Karena disitu tentunya ada *message-message* yang memang dari pihak pekerja/buruh dan sebagainya harus ada perlindungan yang kuat.

Itu saja dari saya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Terima kasih Ibu Intan.

Dua tamu kita ini, dari Antara maupun dari Indosat ini, hanya 50 meter dari istana. Jadi hanya 50 meter dari istana berani melakukan. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan manajemen ini. Bagaimana yang jauh dari istana itukan, lebih berani lagi barangkali.

Silakan Pak Imam. Siap-siap Bapak Haruna.

Terima kasih.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua dan Teman-teman Komisi IX.

Yang saya hormati dari Serikat Pekerja Perum Antara dan kemudian Serikat Pekerja dari Indosat,

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Jadi intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ning, kita undang orang-orang itu, manajemen kita undang. Kalau perlu yang bertanggungjawab tadi yang direksi-direksi, direksinya tidak sepakat dengan kita, tidak sepaham dengan kita. Kita ini selalu disikat. Orang yang tidak bekerja yang intinya itu memperjuangkan haknya malah disikat, orang yang di bawah ketiak itu malah istilahnya dipertahankan.

Di sini yang perlu saya tanyakan, tadi kan Bapak menceritakan Pak Kris itu orangnya bagus, tapi sayangnya mundur, terus diganti orang Arab/diganti EO. Qatar termasuk Arab, Ahmad AlNeama. Bukan orang Eropa ya. Itu syarafnya kumat, dia kerjanya model jahiliyah, model kegoblokan dipakai di Indonesia. Orang ini kira urus, tidak boleh dia menggunakan manajemen jahiliyah. Indonesia itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Hak buruh dilengkapi, tidak main sikat-sikat begitu itu.

Terus pertanyaan yang kedua, setelah mereka mem-PHK, ada 50 orang di PHK ya, sudah dikasih duit semua apa belum? 500 orang kan? 600? Sudah di PHK semua? Sudah dapat terima uang semua? Semuanya tidak mau? Apa sebagian mau sebagian tidak ya?

SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Pimpinan, jadi terdampak ada 600. Mohon ijin saya sampaikan, terdampak secara total 677 karyawan yang ditargetkan oleh perusahaan.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):

Jadi masih ada sekitar 27 orang ya? 50 orang yang tidak sesuai undang-undang ya?

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Jadi, Pak Imam, kami tidak pernah mendapatkan angka secara persis. Karena berulang kali kami mencoba untuk bertemu/untuk *hearing* untuk menanyakan apakah benar seperti yang ada di koran-koran 677? Itu mereka tidak memberikan tanggapan sampai dengan hari ini.

Jadi yang kami tidak ketahui secara pasti jumlah betul, tapi di koran 677. Kami hanya mengetahui yang melawan, dalam hal ini yang bersama dengan kami sampai dengan hari ini itu sekitar 52 orang.

Terima kasih.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):

Terima kasih.

Berarti saya sudah masuk itu. Berarti dia arogan, seenak-enak *udel*-nya, tidak jelas itu. Nanti mesti kita undang, kita agendakan. Kita masih masuk ini hanya seminggu lagi, setelah itu kita tugas tanggungjawab reses menyerap aspirasi rakyat. Mungkin pelaksanaan ini setelah reses. Kalau ini sudah padat ini. Namanya hukum itu tidak ada kadaluarsa. Masih baru itu, masih bisa di proses. Jadi kita usulkan seperti itu tidak masalah.

Kemudian yang Antara. Antara inikan termasuk perum ya, menurut saya ini juga rada arogan juga, direksi baru mintanya mobil baru juga, dan lain-lain, mengurangi hak karyawan.

Itu tadi berapa yang di PHK yang Antara? Coba langsung izin, Ketua, sekitar berapa orang?

KETUA SERIKAT PEKERJA LKBN ANTARA:

Yang pengurus itu 4, yang karyawan sudah 55.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, S.H., M.M.):

Jadi 59. Boleh nanti kita luruskan, kita tertibkan, nanti perjalanan waktu kita minta materi-materi. Kalau kita rapat dengan Menteri Tenaga Kerja akan kita sampaikan. Kalau perlu kita sampaikan juga bahwa Menteri Tenaga Kerja sekarang sudah di *rewes* oleh BUMN, dianggap angin. Itu tidak boleh seperti itu. Maka nanti kalau perlu kita adakan rapat gabung.

Intinya sudah kami data, terima kasih Bapak/Ibu. *Insyah Allah* kita perjuangkan aspirasi ini. Kita tahu berdasarkan laporan, laporan sudah kita terima, nanti kita luruskan.

Itu saja, Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Selanjutnya Pak Haruna, silakan.

F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.

Yang kami hormati, Pimpinan/Teman-teman Anggota Komisi IX;
Para *stake holder* dari dua BUMN ini.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Yang pertama ke Indosat Pak. Ini pertanyaan, adakah yang hadir disini yang tahu bayangan profit keuntungan Indosat pertahun? Ini perusahaan termasuk perusahaan raksasa nasional Pak.

Pertanyaan kedua, inikan sudah Tbk, siapa pemegang saham pengendali? Apakah Tbk, atau Qatar, atau Indonesia? Tiga disini pasti ada. Qatar, Indonesia, atau Tbk (publik)? Dan orang darimana komisaris utama Bapak? Komisaris itu utama pengendali pemilik. Dan pertanyaan kedua, 600 juta itu ditawarkan PHK prosedurnya seperti apa yang di kamar-kamar itu yang ditawarkan tiap jam turun, tiap hari turun. Saya kira kalau 600 juta itu cukup. Dan penyebabnya minta PHK tentu ada. Apakah kinerja orang Indonesia seperti bagaimana, atau gaji terlalu mahal, atau ada saingan pekerja lebih murah dan lebih bagus? Siapa tahu ada tenaga Arab lebih murah dan lebih bagus. Kalau tidak ada ya kita bisa mediasi. 600 juta bisa modal kerja, di atas KUR. KUR sekarang Keppres cuma tertinggi 500 juta, berarti ini di atas KUR. Kalau memang 600 juta saya sarankan terima saja dulu, baru kita negosiasi ulang.

Itu yang tiga untuk Indosat.

Kemudian untuk Antara. Apakah yang 168 miliar itu merupakan gaji pegawai atau belanja pegawai? Dan penyerahan 168 juta apa setiap bulan atau setiap tahun? Tadi saya dengar ada anggaran dari BUMN 168 juta.

Yang kedua, posisi Bapak sekarang yang di BUMN seperti apa? Karena banyak BUMN yang kita akan lebur, itu kemungkinan nanti mencapai 70-80 persen akan dilebur.

Saya kira itu, dua pertanyaan untuk Antara dan tiga pertanyaan. Ini sangat menarik pertanyaan pertama untuk Indosat. Sebab komisaris utama itu penentu kebijakan. Bukan dirut di perusahaan. Dirut itu melaksanakan kebijakan dan keputusan diambil oleh komisaris. Makanya dirut itu tidak punya masa jabatan.

Saya kira itu untuk informasi buat Bapak-bapak semua. Dan teman-teman dari Antara sekian dulu.

Walloohul Muaafiq Illaa Aqwaamith Thooriq.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Terima kasih Pak Haruna.
Selanjutnya, Pak Alifuddin.
Sebentar Pak ya.

Ini belum daftar disini. Ada daftar Pak?
Kalau begitu Pak Alifuddin dulu, setelah itu Bapak ya.

F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):

Bismillaahirrohmaanirrohiim.
Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman dari Indosat dan Antara.

Nama saya Alifuddin dari Fraksi PKS, A-453, dari Dapil Kalimantan Barat.

Setelah mendengar paparan ini saya sangat sedih, karena untuk Indosat kan masih ada saham Pemerintah juga. Untuk Antara 100 persen Pak ya. Jadi kita bayangkan bagaimana kondisi teman-teman pekerja kita di luar itu, yang ada disini saja seperti ini perlakuannya. Untuk itu kami minta kepada teman-teman Komisi IX agar kita tindaklanjuti lebih lanjut, kita tangani dengan serius, karena ini menyangkut hak-hak agar bisa dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Sebelah kiri, Pak Nabil apa Pak Saleh?
Pak Saleh.

F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):

Ikhlas tidak ini?
Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IX.

Pertama saya menyampaikan rasa prihatin pada teman-teman yang datang mengadukan persoalan ini ke Komisi IX. Dan ternyata bukan hanya Komisi IX, juga ke komisi-komisi lain.

Cuma saya heran, Pak Dewan itu ikut yang di PHK? Bukan ya. Mantap berarti, itu bagus itu. Karena saya lihat tadi pagi masih nulis berita saya. Jadi makanya kok saya tiba-tiba kok dia ikut di pecat. Bukan di PHK ya bahasanya.

Saya begini, Bapak/Ibu/Saudara yang hadir ini dan juga teman-teman komisi, saya biasanya lebih taktis saya kalau urusan begini-begini. Nanti kalau kita ceramah/cerita sana-sini, retorika sana-sini, tidak selesai

masalahnya ini. Bapak/Ibu kan ingin ada penyelesaiannya. Dan sudah mengadu kemana-mana kan tidak selesai.

Di Komisi IX ini pernah dulu ada kasus seperti ini juga. Kita membuat semacam tim kerja Komisi IX khusus mengawal yang seperti ini. Jadi nanti kita minta PHI langsung, Dirjen PHI itu. Kalau dia tidak mampu, kita suruh dia berhenti jadi dirjen. Masa kita tidak bisa. Kita ini semua partai ada disini. Jadi menurut saya lebih bagus nanti Dirjen PHI nya panggil kesini. Khusus nanti Pimpinan panggil. Ini saran saya kepada Pimpinan, panggil Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial, tunjukkan kalau dia mampu menyelesaikan masalah ini. Kalau urusan seperti ini saja dia tidak mampu berarti tidak layak dia jadi dirjen disitu. Kan banyak urusan di republik ini yang lain. Ini perusahaan bonafid. Siapa bilang Antara tidak bonafid, siapa bilang kalau Indosat itu tidak bonafid. Orang malah bercita-cita itu untuk kalau nanti tamat kuliah kerja di Indosat. Sekarang sudah masuk di Indosat dibuang begitu saja.

Karena itu menurut saya, lebih taktis, Ibu Ketua, itu nanti kita panggil itu. Mana Pak Wahab tadi, ada Wahab tidak? Dulu kan Pak Wahab pernah itu kita tugasi samai Ibu Ari untuk mengawalnya itu. Jadi nanti di Pimpinan dan juga Anggota diminta berapa orang kita tugaskan khusus untuk mengawal ini.

Karena begini, jangan sampai orang mengadu ke DPR ini tidak ada solusinya, kan hilang kewibawaan DPR itu kalau tidak ada solusinya. Apalagi ini wartawan semua ini yang dari Antara ini. Besok-besok ditulis orang itu "tidak ada gunanya kita datang kesana". Sudah itu foto-foto lagi habis inikan. Kan biasanya habis audiensi ini foto-foot ramai-ramai. Menurut saya itu tadi lebih konkrit.

Tadi bagus juga ceritanya Ibu Ning tadi bahwa Beliau ini memang dia mengerti orang buruh lah. Kita inikan orang-orang proletar juga, sama. Jadi ini paham dia. Kita panggil menterinya bagus juga. Tapi kita teriaki menterinya disini ya belum tentu bisa terlaksana juga.

Kita di BPJS saja menterinya sampai pagi, setengah empat pagi kita buat disini. Tetap saja dinaikkannya BPJS itu. Itukan yang kira pikirkan rakyat juga Pak.

Ada banyak hal ini kadang-kadang kita tidak bisa memang, di penjelasan Pak Ketua tadi ada banyak hal kami tidak paham. Tapi kok sudah kami sampaikan kesini tidak jadi, sudah kami sampaikan tidak selesai. Kan begitu Pak. Memang banyak yang tidak bisa dijelaskan di republik ini. Jadi kalau hanya sekedar minta penjelasan itu ya tidak tuntas.

Kalau saya sederhana saja, kita bentuk timnya kalau memang ikhlas. Ibu Ketua, Bang Ansory, Pak Ketua, tadi saya usul buat semacam tim kerja saja disini untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti yang kita panggil PHI. Memang mitra kita itu, itu alat kita yang memang bisa kita kerjakan. Nanti kita minta juga Ibu Menteri, menterinya kan baru, "Ibu Menteri, tolong Ibu tunjukkan misalnya Anda memang mampu menyelesaikan masalah yang seperti ini". Kita kawal. Kalau saya setiap rapat nanti tanya dulu pertanyaan pertama, bagaimana kasus Antara, bagaimana kasus Indosat. Kalau belum di jawab itu rapat ditunda dulu, skors, minta jawaban dulu. Itu baru main namanya. Kalau tidak kan tidak jadi-jadi itu.

Saya rasa begitu, Pak Haruna, tadi pertanyaan-pertanyaan Bapak kan bagus juga itu 'siapa yang punya'. Ini tidak ada urusan, mau siapapun yang punya orang ini harus diselamatkan. Melanggar Undang-Undang Dasar 1945 'setiap warganegara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan'.Orang ini diperlakukan secara tidak manusiawi menurut mereka, karena itu kita bela.

Kalau saran saya sederhana begitu, setuju tidak Ibu Ning? Ini jangan diam-diam saja, ini sama-sama proletar kita ini. Jadi kalau setuju menurut saya di salah satu kesimpulan yang bisa diambil oleh teman-teman ini dari kita itu adalah soal itu, supaya ada *preseden* baik dari DPR ini bahwa kalau orang datang ke DPR itu mengadu *Insy Alloh* ada solusinya. Kalau misalnya kita per komisi saja tidak bisa menyelesaikan solusi, bagaimana mereka mau mengadu perorang di dapil kita masing-masing?

Saya kira itu Pak, silakan ditambahkan kalau mau ada yang mau disempurnakan lagi. Cukup ya?

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

Cukup, teman-teman?

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, dan
Para Tamu undangan yang berbahagia, dari Indosat maupun dari Antara,

Sebagaimana yang disampaikan teman-teman, baik dari Ibu Ribka maupun Pak Saleh dan kawan-kawan yang lain tadi bahwa persoalan ini terutama yang Antara ini ternyata sudah lama, dan tadi disampaikan oleh ketuanya bahwa semua sudah dilalui tapi belum selesai juga pada hari ini. Kalau dari Indosat inikan termasuk baru.

Selain Dirjen PHI yang untuk menyelesaikan ini, bagi saya atau bagi kami bahwa Bapak/Ibu sekalian ini kerjanya paling tidak di sebagian besar miliknya pemerintah juga. Dan ini di bawah BUMN yang Antara. Sedangkan Indosat Pemerintah juga masih punya saham didalamnya.

Kemudian, meskipun ada tenaga asing yang ada disitu, tetapi tempatnya berada di Indonesia/di negara kita, oleh karena itu kita harus menegakkan hal tersebut. Meskipun kita-kita yang ada di Komisi IX ini perempuan-perempuannya ini kuat-kuat semua. Apalagi Mbak Ning kalau masukkan kamar, yang manggil sudah takut sendiri ini yang di kamar ini. Oleh karena itu ini juga harga diri bagi kita semua juga. Oleh karena itu menurut saya hal semacam ini bisa terjadi di BUMN yang lainnya juga, tidak hanya di tempat Bapak/Ibu sekalian. Untuk itu, ini menteri baru, Pak Erik Tohir, mestinya harus tahu hal-hal semacam ini. Meskipun Beliau juga tahu dari yang lain, tapi paling tidak tahu juga nanti dari kita-kita, khususnya dari DPR yang menyampaikan kepada Beliau.

Maksud kami bahwa langkah yang akan kita ambil, selain kita memanggil Dirjen PHI, nanti kalau kawan-kawan setuju mempertemukan kementerian. Tadi ada juga Kementerian Tenaga Kerja yang sudah ambil langkah, kemudian BUMN, dan perwakilan dari Bapak/Ibu sekalian tentunya, kemudian juga dari Dirjen PHI nanti juga akan hadir didalamnya. Sehingga ini semuanya *clear*, tidak berdiri sendiri-sendiri. Sebagaimana yang Bapak

sampaikan tadi sudah kesini, ada ini, ternyata dari BUMN, terutama dari perusahaan-perusahaannya, tidak ada langkah-langkah apapun, tetap dijalankan. Apalagi yang dilanggar adalah undang-undang.

Dan kelihatannya apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak tadi terkait dengan penekanan-penekanan itu sepertinya di dalam otak saya/kepala saya ini terbersit begitu, mungkin saudara-saudara kita yang di Timur Tengah mungkin juga dibegitukan, akhirnya dipaksa/ditekan seperti itu. Dan ini dibawa kesini karena disana mungkin berhasil sehingga mungkin dibawa ke tempat kita, dan ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu Menteri BUMN juga harus tahu, seluruh rakyat Indonesia mungkin ini juga ada berita juga harus tahu.

Jadi saya sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian bahwa, kalau untuk besok dalam minggu ini kita tidak mungkin untuk melaksanakan itu. Nanti tolong disampaikan masalahnya kalau kita tidak bisa melaksanakan pada hari besok, karena besok kita sudah ada jadwal, kita juga menerima mulai dari jam 10.00, kemudian ada *on the spot*. Meskipun ada bagi-bagi tugas ya. Karena teman-teman ini juga banyak yang sudah ada di luar kota juga, sehingga ini agak repot. Kita reses sampai dengan tanggal 22 Maret, sehingga baru setelah itu kita baru bisa melaksanakan itu.

Namun juga ada untungnya, kalau misalnya kita mengundang dari mereka yang bukan mitra kita itu masih ada waktu untuk membuat jadwal apabila kita akan melaksanakan rapat dengan Beliau. Ini saya sampaikan, nanti kira-kira apa yang terjadi dari Bapak/Ibu sekalian ini, atau langkah awal apa. Ini saya kembalikan lagi, langkah awal apa yang memang harus kita ambil, supaya Bapak/Ibu sekalian ini juga tidak terjadi.

Tadi kan sudah sampai yang 52, sekarang lagi proses kan, sudah ke PHI ya sudah? Belum? Ini kira-kira nanti apa yang terjadi kalau misalnya kita baru akan melangkah pada bulan Maret, khususnya setelah tanggal 23.

INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):

Interupsi, Ibu Pimpinan.

Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan terkait dengan langkah-langkah itu. Cuma kalau mereka ini menunggu sampai sebulan lagi, kurang lebih sebulan, 22 hari lebih, saya khawatir dalam proses 22 hari itu ada hal-hal lain lagi yang terjadi di mereka berkembang.

Karena itu, ini kan ada dua hari lagi kita, kalau bisa besok dipanggil saja itu Dirjen PHI nya. Tidak usah RDPU, panggil dirjennya kesini ketemu Pimpinan, itu sah. Di panggil, lalu diinstruksikan ini ada masalah. Ditunjukkan ini masalahnya ke mereka. Lalu nanti kita tunjuk ini Wahab Cs ini. Kan ada TA kita banyak. Kita kasih anggarannya dari kita, anggaran apa celengan komisi itu, tabungan komisi itu kasih, itulah gunanya itu. Kan tidak ada masalah. Paling berapa ongkos mereka untuk mengecek terus ke kementerian. Kita kasih delegasi, buat surat resmi bahwa mereka ini nanti ditugaskan komisi untuk mem-*followup*. Begitu nanti selesai, pada bulan Maret masuk, laporan dari petugas kita dari TA itu masuk ke kita, kita evaluasi. Itu nanti kita panggil lagi mereka.

KETUA RAPAT:

Izin, Pak Saleh.
Maksudnya kita tidak lakukan

F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):

Dengan mereka? Tidak perlu.

KETUA RAPAT:

Bukan, maksudnya bareng-bareng disini. Siapapun yang kita tugaskan menginformasikan pada Dirjen PHI.

F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):

Jadi sebetulnya kan cocok juga ada semacam RDP dengan dirjennya. Tapi masalahnya kan waktunya tidak cukup, saya lihat kan jadualnya padat. Sebaiknya besok diwakafkan dua orang pimpinan ini, panggil itu Dirjen PHI. Memang itu tugas kita. Panggil, lalu dipanggil TA-TA berapa orang, 5 orang begitu, diminta kepada mereka ini "ini loh tim dari Komisi IX". Nanti di kawal oleh Pimpinan. Anggota kita tunjuk beberapa orang. Nanti mereka akan bekerja itu mem-*follow up*. Kalau mereka sudah dapat surat begitu tim tenaga ahli kita ini, tapi jangan disalahgunakan surat-suratnya, itu nanti punya kekuatan untuk mengecek. Mereka datang ke kantornya PHI sana. Kalau perlu mereka tiap hari mengecek disitu bagaimana perkembangannya. Nanti biar PHI itu memproses. Nanti selama satu bulan kedepan kita balik lagi dari reses itu sudah ada *follow up*-nya. Kalau ada *follow up*-nya, apakah ini progresif atau mundur atau apa, baru kita bisa ambil langkah-langkah politik lain.

Menurut saya begitu, jadi daripada kita tunggu. Saya tahu ini apa yang ada di benak Bapak/Ibu begitu disebut tanggal 22 kembali lagi, "waduh bagaimana", kan begitu, benar tidak? Jawab dulu.

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Interupsi.

F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):

Jangan interupsi ke saya. Disana pimpinannya.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar, biar diselesaikan dulu.

Sebelumnya maksudnya begini, saya tanya dulu, yang disini sudah ke PHI belum? Belum Pak, yang ini belum ke PHI Pak. Baru yang Antara, artinya yang ini yang bisa. Oleh karena itu nanti minta kepada masing-masing poksi saja untuk satu-satu.

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT

Boleh menjawab pertanyaan yang tadi dari Anggota Dewan?

Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.

Sekalian untuk menjawab pertanyaan dari Anggota Dewan yang terhormat tadi.

Yang pertama, kami hanya ada satu serikat pekerja, Ibu Ning, hanya ada satu Serikat Pekerja Indosat, yaitu SP Indosat. Kami berdiri di tahun 1999. Dan selama ini kami berkontribusi untuk membangun perusahaan. Dan salah satu hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Harun “kalau 600 juta itu sudah gede, ambil saja”. Sebenarnya bukan itu hal yang kami perjuangkan hari ini Pak.

Yang kami perjuangkan hari ini adalah, orang asing ini memperlakukan kami melanggar undang-undang, mekanismenya yang tidak dilakukan. Secara di PKB kami dikatakan:

1. Jika PHK atas keinginan perusahaan, maka harus *volunteer*, yaitu orangnya harus sukarela;
2. Harus disepakati oleh SP besarnya.

Kalau Bapak dan Ibu di sini yang hadir mendengar dari Telkomsel, mereka *sharing* kepada kami kemarin. Bahkan mereka itu ditawarkan 75 kali PHP Telkomsel, *equal* dengan manajer 2,5 M hari ini, hanya 200 sekian yang mau mengambil. Dan hanya 89 orang yang disetujui. Karena apa, karena pada hari ini uang itu sangat relatif sekali.

Dan kami sudah mengalami PHK empat kali dengan yang ini, dan keseluruhannya itu selalu saja ada orang yang hadir ke serikat pekerja dan mengatakan “saya salah, kenapa dulu saya ambil”, walaupun lebih dari undang-undang. Karena apa, karena kami tidak pernah diajarkan cara menggunakannya, karena kami hanya melihat uang sesaat saja uang yang besar. Dan pada saat itu kemudian uang itu ditipu oleh orang-orangnya dia sendiri, di tipu emas, di tipu investasi bodong, dan lain sebagainya. Akhirnya hari ini mereka semuanya *collaps*.

Dan satu lagi hal yang Indosat perlu Bapak/Ibu ketahui. Dulu Indosat itu memberikan fasilitas kesehatan pensiun untuk pensiunan. Dan pertahun 2019 itu dicabut. Jadi orang-orang pensiunan itu sudah mendapatkan sesuatu, kemudian mereka tidak mendapatkan pensiun, dan mereka semuanya bermasalah.

Jadi hari ini yang kami perjuangkan bukan masalah uang yang besar atau uang yang kecil. Tapi kami memperjuangkan rakyat Indonesia yang hari ini tetap mau bekerja. Dan kami di PKB, di undang-undang, dihalalkan serikat pekerja untuk membela. Dan mereka sama sekali tidak memberikan kesempatan.

Kenapa kami langsung RDP bersama Bapak/Ibu yang terhormat sekalian, karena dari media massa kami selalu tahu dari media massa, media mengatakan “kami yang di PHK sekian”, media massa mengatakan kepada kami bahwasanya Menteri Tenaga Kerja peduli dengan Indosat. Dan katanya mengirimkan orang, kami juga mendapatkan kabar Menteri Tenaga Kerja mengirimkan orang untuk berbicara manajemen, dengan serikat, karena penting untuk tetap ada orang Indonesia yang bisa kerja. Karena sekarang lagi masanya menciptakan lapangan pekerjaan.

Tahukah Bapak dan Ibu, pada hari itu mereka datang kepada manajemen kami, dan kemudian tidak menemui kami, langsung pulang. Tidak menemui kami. Padahal di korang mereka bilang akan menemui perusahaan dan serikat pekerjaanya.

Dan yang paling mengerikan lagi, Bapak dan Ibu, waktu mereka mengatakan ingin memecat tidak diskusi sama SP. Karena ini rahasia, karena biar efektif, dan biar semuanya masuk ke dalam katakanlah indikasinya kami adalah perangkap agar banyak yang mengambil.

Pada saat itu yang mereka lakukan apa, Bapak dan Ibu? Mereka tidak memberikan kesempatan kami untuk memiliki hak membela. Dan terbukti kemarin teman-teman *bepartit* satu. Teman-teman sudah bilang "kami diwakili oleh serikat". *Tambeng, bepartit* bilang "besok tanggal 27" Karena mereka sudah sosialisasi setelah tanggal 14, tanggal 18 mereka sosialisasi, "kami akan menyelesaikan PHK ini hanya 140 hari saja". Kalau ada orang yang sangat PeDe seperti itu, Bapak dan Ibu, kami takut. Jangan-jangan kementerian itu dan lain sebagainya juga dilewati tanpa pengawasan kami, karena orang ini sangat yakin PHI pun akan berpihak kepada mereka dan menyelesaikan dalam 140 hari saja. Ini kepercayaan diri yang sangat luar biasa.

Jadi sekali lagi kami sampaikan, ini bukan masalah hal yang sifatnya formula ataupun hal yang sifatnya tambahan dari Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13, tapi ini masalahnya orang ini mekanismenya itu sengaja melanggar, karena tahu tidak ada sanksi, karena tahu tidak akan dipanggil.

Dan jika Ibu Ning dan teman-teman mau datang ke Indosat, mohon maaf Ibu, CEO kami itu hanya hadir sebentar saja di Indosat. Ahmad Al Neama itu kalau datang pakai mobil CD, korps diplomatiknya Qatar. Dan dia hanya berkantor sebentar saja di Indosat, hanya sebentar saja. Jarang dia satu bulan *full*. Dia hanya bolak-balik Qatar. Ada wakilnya yang India itu, Pak Fikram. Artinya, Ibu kalau mau bertemu sama CEO itu memang agak susah, karena dia *part of* dari keluarga kerajaan.

Dan rasanya buat kami bagaimana mungkin kami harus mengadu ketika berhadapan dengan pengusaha yang uangnya banyak sekali. Bahkan dalam urusan apapun Dia selalu bilang "nanti kita ketemu di pengadilan hubungan industrial, nanti kita ke pengadilan saja". Selalu seperti itu, seakan-akan indikasi yang saya dapatkan bersama teman-teman, karena kami tidak pernah diajak diskusi, dan dia langsung-langsung. Dia punya uang yang cukup banyak untuk membayar *lawyer-lawyer* dan menyelesaikan di pengadilan.

Apapun itu untuk kami itu adalah masalah harga diri bangsa ini. *Outsourcing* yang dia lakukan itu adalah *outsourcingnetwork*. *Network* adalah *core business* telekomunikasi. Di *network* itulah ada rahasia negara, ada rahasia segala-galanya, dan dia ingin *outsourcing* melalui Ericsson yang merupakan sebuah desain yang dari Qatar nya langsung. Apakah memang di ring satu ini sudah ada yang namanya kerajaan baru Qatar hingga akhirnya mereka bisa sewenang-wenang untuk menghajar setiap orang Indonesia yang ada di sana.

Jadi, Pak Harun, ini bukan masalah uang 600 juta. Ini bagaimana pasar di Indonesia itu bisa ada yang membeli karena orang Indosat masih bekerja disana. Bagaimana lebaran nanti masih ada orang yang bisa membeli barang karena orang Indonesia masih bekerja disana.

Yang perlu Bapak ketahui, kami itu *level* manajemen ke atas, dibawahnya direksi, itu banyak sekali orang asing dan luar negeri. Berbagai macam label, *advisor*. Mereka baru merekrut 24 orang luar negeri satu tahun sampai dua tahun kontrak di Indonesia dengan gaji dollar untuk mengerjakan sesuatu yang orang Indonesia sudah bisa kerjakan.

Saya bilang tadi, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu sudah memberikan orang terbaik dari Telkom kepada kami untuk bekerja keras dan menyelamatkan Indonesia. Pak Chris Kanter sudah melakukan itu, itulah hasilnya.

KETUA RAPAT:

Maaf, tadi sudah disampaikan banyak tentang itu.

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT

Betul, makanya saya tekankan.
Tidak masalah yang ya.

KETUA RAPAT:

Makanya, penyelesaiannya tidak hanya di PHI nya. Tetapi kalau Ibu itukan menyangkut undang-undang, menyangkut etika didalam itu, oleh karena itukan tidak bisa diselesaikan dengan cepat, maka harus mengundang. Kementerian Ketenagakerjaan juga harus tahu persoalan ini, BUMN juga harus tahu tentang hal-hal ini. CEO nya juga harus di undang. Kalau sudah Bapak/Ibu ceritakan kan dia akan bagaimana dia akan memberikan respon. Oleh karena itu yang ini tentu kami akan menyelesaikan tidak bisa cepat. Karena kita harus menyelesaikan banyak.

Sebagaimana yang Antara tadi yang disampaikan Pak Saleh kita akan mungkin hari Kamis setelah paripurna kami akan mengundang PHI saja. Jadi nanti kami akan temui.

INTERUPSI F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING):

Pimpinan, bisa tambah sedikit ya.

Saya setuju dengan Pak Saleh masalah dirjennya/Ibu Yani di undang.

Kenapa saya mau langsung main atas saja? Soalnya begini, yang kita hindari kan jangan sampai PHI ini, *tripartit*. Kalau masih bisa diselesaikan itu saya sih kalau kayak begitu.

KETUA RAPAT:

Ini yang mana?

F-PDIP (Dr. RIBKA TJIPTANING):

Keduanya lah.

Tripartit itu pengalamannya kalau sudah masuk ke hukum biasanya buruh itu kalah. Dua lawan satu. Masuk anginlah pasti. Betul, saya sudah *negative thinking* saja, sudah pengalamannya.

Pernah menangani satu kasus Suzuki. Suzuki 7.000 itu waktu itu menang, di PHI menang. Tapi juga tidak bisa di eksekusi. Itu pengalaman saya pernah mengalami itu satu PT Suzuki 'seolah-olah' menang, kita sudah senang ini. Tidak di eksekusi. Semua mana kasus buruh menang di PHI? Kalah, dua lawan satu. Seolah-olah pemerintah selalu *tripartit*. Disuruh kita mediasi, harus pemerintah itu netral. Tidak. Pemerintah harus berani memihak yang tertindas, harusnya begitu. Tapi tidak akan ada berani begitu.

Terima kasih, tidak akan.

KETUA RAPAT:

Sarannya Mbak Ning apa, mengundang siapa?

F-PDIP (DR. RIBKA TJIPTANING):

Langsung menteri atau *on the spot*?
Kalau cuma dirjen *tantangan* kalau selesai.

KETUA RAPAT:

Justru itu, Mbak, tadi yang ini kita selesaikan dengan pertemuan itu. Tetapi tidak mungkin bisa bareng. Tidak mungkin dalam waktu yang relatif cepat, tidak bisa. Itu makanya saya sampaikan.

Yang inikan sudah proses ya, sudah jalan. Makanya yang kita panggil adalah PHI dan BPK nanti bersama-sama. Kalau ini mungkin bisa Kamis setelah kita rapat paripurna. Kalau besok kayaknya agak padat.

Sedikit, Ibu.

Terima kasih Bang Saleh dan Ibu Ribka.

Insya Allah permasalahan yang dua ini kami di Pimpinan, dan saya pribadi, saya akan kawal sampai ke akar-akarnya. Dimana nanti letak tersumbatnya nanti saya pribadi saya akan kesitu. Saya juga takut juga disini ada, Ibu Ning, lingkaran setan seperti yang kita selama ini. Kenapa saya bilang 'lingkaran setan', berarti yang dalam lingkaran itu perilakunya setan. Ini di rekam. Siapa yang lingkaran itu, di Kemenaker ada pengawasannya, di pengadilan ada di PHI nya, di perusahaan ada penguasanya. Saya takut juga nanti siapa komisar-komisaris kalian itu.

Saya dengar-dengar ada yang dari BIN, Komisar Indosat. Biasanya para perusahaan-perusahaan ini mereka jadikan komisar-komisaris mereka itu bintang-bintang. Pernah juga, Ibu Ning juga masih tahu dulu, pernah ada yang bintang dulu datang kesini, sementara buruhnya ada di balkon. Di balkon ngomong, kemudian yang komisar jenderal itu bilang ke yang balkon "diam". Terus karena dia disini ngomong sambil berdiri, kita bilang sama pamdal, "Bapak Jenderal kalau tidak duduk akan diusir oleh pamdal".

Jadi kita menginginkan disini jangan sampai Bapak-bapak/Ibu-ibu yang datang disini terlalu di hina, juga jangan juga mereka-mereka itu sombong. Maka yang kita lakukan sebelumnya ini, kita akan panggil yang Bapak-bapak bilang tadi itu. Yang Neama itu akan saya panggil itu nanti.

Saya baru tahun yang lalu ada satu dirut juga orang Eropa dari Itali, dia melakukan semena-mena. Bukan terhadap banyak orang, terhadap satu orang dari direksinya tanpa apa-apa di pecat. Mana nomor HP nya, saya telepon, "Bapak mau bayar itu atau mau dipanggil kesini, ke komisi". Saya Anggota waktu itu, Ibu Ribka.

Kita semuanya sama ininya disini. Mau Pak Saleh, Ibu Ribka, kita semuanya sama disini untuk menghadapi Bapak/Ibu. Setelah telepon diselesaikan kok.

Jadi sekali lagi, Bapak sudah datang kesini dari Antara, kita akan kawal terus. Cuma ini pengawalan inikan istilahnya jangan anggap kayak membalikkan tangan. Itu yang kita inginkan ini harus ada kesabaran. *Insyah Alloh* kita nanti akan koordinasi juga nanti dengan senior-senior kita apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi Bapak/Ibu. Tolong jangan diragukan kami. Kalau meragukan nanti telepon kami, ada nomor HP semua ininya. Jadi kalau perlu nanti kasih saya juga nomor si Ahmad Al Neama itu. Saya akan ke kedutaan Qatar, nanti saya ketemu "kenapa ini, kenapa ini, kenapa Anda lakukan ini?"

Karena Bapak/Ibu tadi semua *ngomong* direksi/direktornya, kita akan panggil kesini. Jadi mungkin nanti kalau bisa dari sekretariat tolong. Nanti kalau besok kan kita mau ke Meikarta, ada 3.000 tenaga kerja asing illegal yang mau kita lihat disana. Kita juga besok mau ke Paseban, ada disitu yang aborsi 900 orang lebih yang mau kita lihat. Jadi permasalahan kita ini banyak. Jadi jangan "harus besok", jangan. Jadi memang kita ingin. Biar nanti kita menangani secara serius, tidak boleh terpotong. Karena masih ada reses ini. Tetap nanti kita lakukan yang terbaik. Tapi nanti akan kita cari jalan yang pas biar tidak terputus. Kalau sudah ke sini, ke Kemenaker, bahkan sampai ke pengadilan saya sering duduk dibelakang, beberapa saya duduk dibelakang. Ada yang bisikin hakimnya itu, itu ada anggota yang tidak tahu kita ada orang duduk dibelakang. Akhirnya buruh dimenangkan. Ada itu beberapa.

Memang betul apa yang dibilang oleh Ibu Ning itu istilahnya kasus-kasus kalau sudah di PHI. Tapi kalau saya, saya kawal. Kalau sempat disitu PHI kawal. Di HP saya dalam jangka satu jam ada lima stasiun TV, 50 wartawan datang menghadap saya kalau ada yang main-main.

Jadi istilahnya itu kalau nanti serahkan ke kita lah, *Insyah Alloh*. Kalaupun nanti kalian lihat kita mungkin masih ragu, datang. Ada komisi, ada kantornya, ada apanya. Jadi akan kita lakukan *Insyah Alloh* yang terbaik, dan akan kita komunikasi dengan seluruh anggota kita. *Insyah Alloh* anggota-anggota yang 51 orang di Komisi IX ini *punggawa-punggawa* buruh semuanya.

Kemarin juga sudah dicontohkan kemarin waktu demo 20 kemarin istilahnya sudah berteriak-teriak disana "kami bersama buruh". *Insyah Alloh* akan kita kawal ini. Serahkan ke kita. Saya usul untuk hari Kamis itu kalau paripurna pagi, kita panggil siangnya dua ini, manajemen dua ini, manajemen Antara dan manajemen dua-duanya kita panggil. Karena sudah datang ini. Apapun nanti yang ini ya terserah nanti ininya. Tapi kita panggil dulu benar tidak yang mereka datang ini. Itu saja yang utama dulu.

Ini sudah datang ini, sudah datang ke kami dari karyawan Bapak, mereka bilang seperti ini, bagaimana ini? Jadi nanti hari Kamis.

INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.):

Interupsi dulu, Ketua.

Arahannya dulu, kesimpulannya apa ini.

Ini jam berapa sebetulnya selesai RDPU ini.

Maksud saya kalau memang ada solusinya, tadi kan ada tawaran-tawaran, tawaran saya tadi sudah separuh dibuat, tawaran Ibu Ning nanti menterinya dipanggil. Maksud saya itu saja dibuat kesimpulan seperti itu, supaya mengikat. Ini kalau kita ceramah lagi ini, saya kalau dikasih kesempatan bolehlah 30 menit lagi.

Menurut saya itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini biasanya kan kalau kita RDPU itu sebenarnya tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Cuma barusan dua minggu yang lalu ada Komisi I itu RDPU, kemudian Komisi XI RDPU, itu ada catatan. Jadi kita sekarang akan membuat catatan. Yang pertama itu memanggil manajemen-manajemennya ini untuk mungkin hari Kamis. Kalau sudah kita panggil manajemennya, apa keputusan disitu nanti kita lihatlah. Baru nanti setelah kita reses kita panggil nanti. Baru dari Kemenaker atau yang lain-lainnya nanti. Kalau memang disini buntu. Siapa tahu nanti disini tidak buntu, langsung diberikan apa yang Bapak inginkan.

Itu usul saya. Tapi terserah keputusan kita, saya mengikuti.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA ANTARA:

Mohon ijin interupsi, Pimpinan, Ketua Umum Serikat Pekerja Antara.

KETUA RAPAT:

Silakan dari Aspek dulu tadi.

ASPEK:

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya mau mengingatkan saja bahwa kehadiran kami disini ini benar-benar setelah kami melakukan perjalanan panjang ke beberapa pihak. Kami sudah kemana-mana Pak.

Bahkan sekedar informasi saja, seminggu yang lalu saya dan Ibu Mirah datang ke kantor Indosat ketemu teman-teman SP Indosat, masih tersisa 114 orang pada saat itu. Hari ini sudah 52 orang tersisa. Bisa dibayangkan, Bapak/Ibu, kalau masih menunggu sampai 22 hari lagi, habis itu 52 orang.

Kami berharap ada terobosan-terobosan dari Komisi IX. Tidak saja secara formal. Secara formal tadi memanggil, silakanlah itu dipanggil segala macam. Tapi ada terobosan formal.

Apa yang tadi Bapak Pimpinan sampaikan akan memanggil Kedutaan Qatar, saya pikir akan sangat bagus. Minimal Pimpinan Komisi IX

menghubungi Kedutaan Qatar untuk meminta menghentikan dulu proses PHK yang sedang terjadi di Indosat, manajemen suruh berhenti dulu. Masih ada 52 orang yang saat ini sedang kita advokasi, dan mereka semuanya terintimidasi. Bahkan 52 orang itupun sudah datang ke SP Indosat “menyesal” katanya, hentikan dulu Pak.

Kami mohon dengan sangat Pimpinan Komisi IX melakukan terobosan-terobosan, tidak saja pada yang sifatnya formal.

Yang kedua yang konkrit juga usul saya, sambil menunggu pemanggilan itu kirim surat Pak. Satu, hubungi Kedutaan Qatar, karena ini kelihatannya CEO nya hanya datang sejam-dua jam saja, lalu kita mau ketemu sama siapa. Ini harus ada tekanan dari negaranya, dalam hal ini Kedutaan Besar Qatar. Kedua, kirim surat ke CEO Indosat untuk menghentikan proses yang sedang berjalan ini. Karena ada 140 hari targetnya. Ini di *stop* dulu Pak.

Kemudian untuk SP Antara harapan kami Pimpinan juga sama melakukan terobosan yang diluar formalitas. Karena sudah ada nota pengawas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi Antara, tapi tidak dilaksanakan oleh Direksi Antara. Dulu waktu Mbak Ning, bukan bermaksud membanding-bandingkan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf bukan bermaksud itu, tapi ada eksekusi yang bisa dilakukan oleh Komisi IX. Mengirim surat kepada perusahaannya untuk menghentikan atau melaksanakan nota pemeriksaan itu. Jadi jangan biar kami kemudian berlarut-larut, berharap banyak sekali kepada Komisi IX, tapi karena jadwal DPR yang memang tidak bisa kita ikut campur disitu, kemudian mengakibatkan semakin banyak orang yang akhirnya terkena dampak yang tidak kita harapkan.

Ini ada informasi, di Algeria katanya pemerintahannya mendeportasi Pimpinan Ooredoo. Jadi di Negara Algeria, Al-Jazair maksudnya, ini saya dikasih contekan, di Al-Jazair itu direksi Ooredoo di deporasi oleh pemerintahnya setelah melakukan PHK massal di negaranya. Inikan satu bentuk yang sepertinya sudah terpolo di Ooredoo ini.

Jadi sekali lagi mohon tidak terjebak pada langkah-langkah yang sifatnya formalitas.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Untuk rapat kita ini Ibu Yayuk kembali berikan ke saya, saya kira tadi Ibu Yayuk melanjutkan semua.

Baik, kepada teman-teman semuanya, anggota, sekarang kita sudah jam lima kurang seperempat (16.45), rapat akan kita tutup jam lima (17.00), dan kita akan bacakan catatan untuk catatan kita rapat hari ini. Jadi tidak kesimpulan, catatan saja yang mau kita ini.

Saya kira mungkin untuk cukup dulu, sudah kita tahu semuanya masukan-masukan yang tadi. Saya cuma ingin menambahkan catatan ini saja yang sudah dibuat. Nanti dari Komisi IX mungkin untuk membuat surat ke Kedutaan Qatar pemberhentian PHK. Nanti akan kita buat surat. Jadi tolong biar rapat kita tidak ini ditampilkan catatannya dulu.

Ditambah catatan ketiga itu membuat surat untuk pemberhentian sementara PHK sebelum nanti kita tanggal 22 kita akan serius menanganinya.

Silakan catatannya dulu.

PEKERJA ANTARA:

Interupsi Pimpinan, ada yang mau kita sampaikan juga menanggapi ada beberapa dari para Anggota Dewan tadi.

KETUA RAPAT:

Silakan satu menit.

Silakan Ibu.

PEKERJA ANTARA:

Terima kasih Pimpinan.

Saya mau menyampaikan, pada saat kami datang kesini kami sudah punya harapan yang besar bahwa nanti komisi ini akan memberikan solusi bagi kami, sudah pasti, sampai detik inipun juga kami berpikir hal yang sama. Karena itu kami berharap bahwa melalui pertemuan ini ada gambaran buat kami bahwa ada solusi yang itu terang buat jalan kami ke depan.

Karena harus kami sampaikan juga bahwa, wartawan Antara itu juga menunggu kabar ini. Wartawan di tempat kami adalah wartawan-wartawan yang sudah terdidik. Dan mereka tidak sama seperti media lainnya dimana mereka masuk, kemudian daftar, kemudian di tes, dan masuk begitu saja, tidak. Mereka harus melalui 6 bulan pendidikan khusus di Kantor Berita Antara. Dan itu adalah pola yang sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu.

Jadi artinya begini, mereka sudah berjuang keras untuk masuk ke Antara, kemudian mereka berusaha untuk memenuhi dan membantu Antara sesuai dengan tupoksinya. Kemudian kalau mereka saat ini menerima hal yang menyakitkan ini mungkin kedepannya juga akan lebih parah lagi.

Pada bulan Maret/awal Maret direksi atau manajemen sudah merencanakan untuk melakukan beberapa tindakan PHK dan mutase, dan tentu saja itu akan mengena pada beberapa karyawan, atau lebih tepatnya pengurus.

KETUA RAPAT:

Bulan Maret ya? Berarti suratnya harus dua nanti.

PEKERJA ANTARA:

Artinya begini, Bapak/Ibu yang terhormat, *draft* itu sudah ada di kami, artinya sudah mulai dibocorkan ke kami. Tapi seperti biasa, detik-detik terakhir itu akan ada perubahan-perubahan. Hal yang sama terjadi pada saat mereka melakukan PHK terhadap beberapa orang yang sudah jelas. Misalnya sampai 30 orang namanya sudah ada, kemudian satu persatu

dikurangi, yang lain ditambahkan. Jadi inilah kegelisahan yang akan terus kami hadapi sebagai karyawan Antara. Dan kami berharap melalui pertemuan ini akan ada solusi dan gambaran juga bagi kami bahwa kami merasa di tolong. Sampai detik ini kami masih berpikir bahwa kami berharap dari sini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Message-nya sudah diterima. Jadi nanti besok pagi kita sudah mengirim surat ke kedua direksi, Antara maupun Indosat, tentang diberhentikan dulu ini proses PHK sebelum nanti direksinya secara lengkap bertemu dengan kita nanti akhir Maret. Itu nanti akan kita buat surat.

Yang kedua nanti bahwa untuk hari Kamis kalau paripurna pagi mungkin kami akan panggil dari pimpinan nanti atau perwakilan dari kapoksi atau tokoh-tokoh kita nanti kita akan ketemu nanti dengan direksinya.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Namanya interupsi ya sekarang, bukan nanti.

KETUA RAPAT:

Nanti saya kasih interupsi, sebentar saja dulu.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Saya interupsi, Pimpinan.
Sebentar, interupsi dulu.
Kalau interupsi dikasih bicara.

KETUA RAPAT:

Nanti saya kasih. Bukan tidak kasih.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Saya bukan mau minta bicara. Saya mau interupsi menyampaikan pendapat saya.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu ya.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Interupsi, Pimpinan.

Itu tata tertib rapat itu begitu, kalau ada orang interupsi kasih kesempatan dulu.

KETUA RAPAT:

Titik dulu, baru saya kasih nanti.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Baru nanti Pimpinan lanjutkan.

Ini sudah kemana-mana ini rapatnya.

KETUA RAPAT:

Iya makanya tadi kan Jam 17.00.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Ibu ini dari tadi mau bicara, sudah angkat tangan, sudah interupsi dari tadi tidak dikasih kesempatan. Pimpinan ngomong terus sendiri, ngoceh kesana-kemari tidak jelas, ini arahnya kemana ini rapat ini?

Ibu ini barusan minta tolong, "tolong kami kasih solusi", baru saya dengar tadi. Jadi solusinya apa?

KETUA RAPAT:

Mau dibuatkan catatan dulu.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Ini catatan apa? Saya mau interupsi dulu, saya jelaskan, interupsi.

Inikan namanya rapat, tadi Pimpinan mengatakan ini RDPU, baca itu tata tertib itu, setiap rapat itu harus ada kesimpulan. Kecuali audiensi, audiensi silakan buat catatan. Yang begini-begini dasar-dasar rapat di DPR saja kita tidak selesai bagaimana. Ini audiensi atau RDPU? Undangan yang saya terima RDPU.

KETUA RAPAT:

Audiensi.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Yang saya terima RDPU, bagaimana ceritanya.

Yang begini-begini harus tertib. Ini saya interupsi tidak dikasih.

Tolong Pimpinan ditertibkan, baca itu tata tertib DPR.

KETUA RAPAT:

Ini saya baca.

Berdo'a dimulai ya. Kemudian kita tadi sudah berdo'a.

Adapun acara kita pada hari ini menerima audiensi terkait:

1. Mutasi dan PHK;

2. PHK Massal.

Tapi terlepas dari itu jangan sampai substansi kita ini hilang.

Silakan.

KETUA SERIKAT PEKERJA ANTARA:

Interupsi, Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan bahwasanya yang disampaikan Pak Saleh benar bahwasanya undangan kita RDPU hari ini. Dan benar kalau Ibu Ning bilang "kawan-kawan kami di kantor yang biasanya pulang jam lima (17.00) ini mereka belum pulang". Mereka menunggu kami pulang, ada hasil apa.

Saya ingin menyampaikan singkat saja terkait pertanyaan Ibu Ning. Salam hormat dari saya pendiri Geber juga. Ibu Ning keren banget.

Tidak akan selesai. Ibu akan tergiring opininya sama seorang direktur kami, seorang Dimas, karena memang dia mulutnya sangat lihai dalam menyampaikan hal-hal yang manis. Contoh saja dia bilang "mutasi dia lakukan". "Kenapa Anda mutasi?", kata Komisi I. Direksi kami bilang apa, "loh, kantor kita ada 34", katanya. "Indonesia itu indah, jadi kita berikan kesempatan kepada teman-teman". Padahal teman-teman pengurus saya ini, saya tidak bisa ngomong, mereka ini orang tuanya ada yang sakit, sampai meninggal. Bendahara saya orang tuanya sakit sampai meninggal karena tahu anaknya di mutase tanpa adanya penjelasan, tanpa sesuai undang-undang. Di PKB tidak dijalankan. Undang-undang yang harusnya dihargai harkat martabat karyawan tidak juga dialankan oleh direksi kami, tidak pernah ditanyakan.

Saya hanya ingin menyampaikan benar bahwasanya kalau ada usulan memang Dirjen PHI itu harus ditekan juga. Karena Dirjen PHI maupun menteri sendiri, Pak Hanif DAhiri, itu kalau karaoke dengan saya biasa. Dia bilang "sifatnya kementerian cuma bisa mengeluarkan anjuran, tidak bisa memaksa". Kita ke PHI, benar kata Ibu Ning, benar banget apa kata Ibu Ning, "percuma, PHI itu kuburan buruh". Kami lakukan kami menang. Tapi tetap saja. Keputusannya apa, "anda disharmonis dengan perusahaan, anda di PHK hari ini", padahal harusnya dilihat. Disharmonis itu buat perusahaan *ownership oke*, tapi kan perusahaan kami kan direksinya berganti-ganti tiap tahun. Jadi kalau disharmonis dengan yang ini belum tentu disharmonis dengan penggantinya besok.

Kami juga dalam rangka memperjuangkan ini sebenarnya kami bantu programnya Erik Tohir selaku Menteri BUMN mau bersih bersih BUMN. Kami sudah lapor ke KPK/ke BPK korupsinya, tapi tetap tidak jalan.

Saya hanya satu permintaan saya. Kalau memang ada pertemuan dengan direksi, Ibu Ning, Ibu Yayuk, Pak Pimpinan semua, kami dilibatkan. Kalau tidak, kami akan tutup buku. Seperti RDP di Komisi I kami hanya bisa teriak di balkon bilang "bohong-bohong". Bahkan saya diancam. Benar apa kata Ibu Ning, kita tidak tahu pulang kita dari sini kita dapat sanksi apa.

Seperti yang Ibu Nana bilang, saya dengan Ibu Nana, saya selaku ketua umum hari ini saya sudah dapat kabar saya sudah di fungsionalkan dari jabatan saya dengan modus divisi saya dihilangkan dari struktur. Dan kami berdua dikembalikan ke SDM. Sudah otomatis kami tidak ada kerjaan. Karena apa, divisi lain tentu akan diancam kalau menerima kami. Tidak akan ada. Ujung-ujungnya kalau kami dikembalikan ke SDM tidak ada yang mau menerima, alasannya di PHK. Inikan pemberangusan serikat pekerja juga, begitu maksud saya.

Itu saya pikir, *sorry* kepanjangan, tapi menurut saya singkat. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Saya dukung banget Pak Saleh, Ibu Yayuk, Ibu Ning, kalau mau rapat gabungan. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, mulut manisnya akan mengubah paradigma Ibu semua nanti.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalaam.

SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Mohon izin juga kami dari Serikat Pekerja Indosat menyampaikan sebentar kalimat.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Tadi kita sampai Jam 17.00.

SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Satu menit.

KETUA RAPAT:

Tambah 15 menit ya.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Pak.

SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Tadi usulan Pak Ansory/Ketua Sidang terima kasih untuk menyampaikan penghentian dulu sebagaimana tadi disampaikan Bung Sabda. Karena memang sebelumnya di teman-teman ada banyak yang ingin *stay*, tapi akhirnya tidak kuat. Sekarang saya 52. 52 pun setiap hari di kejar-kejar terus untuk tanda tangan-tandatanganan. Dengan ancaman apa, lewat tanggal 21 bisa jadi tidak digaji. Ancaman tidak digaji itu menyebabkan

teman-teman yang lain yang *stay* itu “kalau tidak digaji saya tidak tahan *Cak*”. Saya orang Surabaya, maka panggil saya ‘*Cak*’. Kenapa, “saya masih punya utang di bank, bayar angsuran, dan sebagainya, itu memberatkan”. Makanya saya terima kasih sekali tadi disampaikan akan *suspend* atau *cease fire* atau menghentikan dulu, itu lebih baik.

Ancaman berikutnya adalah *bpartit* yang *notabene* sebenarnya tidak layak untuk dilakukan *bipartit*, karena belum ada pembicaraan dengan serikat pekerja. Itu makanya kita menghindari untuk itu sebelum berunding.

Terima kasih, itu saja dari kami.

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Gofur dan Pak Setiadi.

Sebenarnya tujuan kita sama semua. Cuma kalau kita mau mengumpulkan semuanya dalam waktu satu hari ini/dua hari tidak mungkinlah kita mengumpulkan semua kalangan ini, sehingga nanti keinginan dari Pak Gofur tadi itu pasti setelah reses. Yang kita lakukan untuk waktu yang sempit ini apa, kan begitu ya. Jadi nanti kita buat catatan ini.

Sekali lagi, ini di kita ini audiensi, kemudian tadi undangan tadi RDPU, jadi ada *dispute* disitu. Karena inikan buruh-buruh juga ini, kita undang Bapak kan dalam jangka satu-dua hari saja, bukan seminggu, istilahnya dari beberapa laporan-laporan yang lain. Jadi mohon dimaklumi juga.

Jadi sekali lagi, karena tadi ada undangan RDPU, sementara yang saya bacakan tadi ‘audiensi’, jadi ini kita buat catatan dulu. Dari catatan ini nanti kita berembuk disitu apa yang mau kita lakukan. Silakan diperlihatkan catatannya dulu.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Pimpinan, izin.

Jadi ini bagaimanapun juga ceritanya ini namanya RDPU, karena undangannya itu RDPU. Coba baca perihal undangan itu. Saya terimanya undangan, kemudian agenda ‘audiensi’. Makanya ini saya usul nanti di rapat komisi ini ditertibkan yang begini-begini. Jangan seenaknya juga Pimpinan bikin agenda-agenda tidak jelas. Kalau RDPU, RDPU saja. Ini komisi bersama, bukan komisi pimpinan saja. Jadi mohon ini RDPU hari ini, RDPU buat kesimpulannya. Yang tandatangan pimpinan saja, mereka tidak usah ikut tandatangan.

Kalau dia kesimpulan kita bisa kasih masukan. Tadi Pimpinan saya dengar membacakan “satu, catatan ini-catatan ini”, ini catatan siapa? Catatan Pimpinan atau catatan peserta rapat? Jadi ini harus ditertibkankita disini ini, saya mohon maaf ini. Karena dari tadi ini, coba bayangkan, undangan rapatnya kan dari Jam 13.05 belum selesai.

KETUA RAPAT:

Jam 17.05.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Jam 13.00 sampai Jam 17.05, berarti lama sekali. Kadang-kadang kita RDPU dengan mitra saja tidak sampai sebegitu lamanya. Masa kita tidak ada solusi yang urusan beginian. Sekarang kan tinggal bagaimana teman-teman yang hadir ini apa janji kita kepada mereka yang bisa kita kerjakan, yang masuk akal.

Ini contoh yang tidak masuk akal menurut saya. Kita undang dreksinya disini, lalu kita kirim surat ke mereka "jangan PHK dulu", memangnya apa hubungan kerja kita dengan mereka? Memang mereka mau mendengar kita? Memang kalau dia tetap PHK lalu mau kasih hukuman apa sama mereka? Tidak ada hubungannya sama kita. Tapi kalau kita laporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, "Hei, kamu awasi, jangan sampai dia pecatin orang-orang, jangan sampai di PHK". Itu ada hubungannya, karena di PHI itu mereka pegang ijin, pegang macam-macam, biar mengikat. Itu yang saya maksud. Ini sekarang kita mau perintah dia "hei kau jangan pecatin ya, jangan PHK ya", ya tidak bisa. Memangnya kita punya saham di situ? Tidak.

Kita ini adalah mereka, teman-teman ini, kita perjuangkan mereka. Caranya bagaimana, kita panggil kementeriannya. Ini yang dari tadi belum ketemu. Menurut saya ini mestinya kan kesimpulannya sudah ada itu, 1, 2, 3, selesai, kita kerjakan. Ini karena ini sudah RDPU, saran saya ini tetap dibuat kesimpulannya. Kecuali kalau yang tadi dianggap semua tidak ada. Lain kali audiensi ya audiensi. Masa ini lucu ini judul undangan rapat ini, perihal disini rapat dengar pendapat umum, agendanya audiensi bersama serikat pekerja ini. Kan lucu, berarti kan dua disitu, satu RDPU, satu lagi audiensi, mana yang betul? Kemudian Pimpinan membuka rapat terus katanya rapatnya dibuka audiensi. Ini penting ini, ini tolong Pak Melki juga sebagai Pimpinan dirapihkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Saleh.

Jadi kita buat disini kalau memang mau kesimpulan ya kesimpulan. Jadi kalau mau buat kesimpulan silakan dirumuskan kesimpulan. Kesimpulan inilah boleh anggota, mau apapun kesimpulan ini kita rapatkan disini. Inikan contoh kesimpulan kita yang kita buat. Mau kita buat umpamanya disitu langsung ke Kemenaker boleh juga, makanya disini di koreksi. Kan belum kita buat kesimpulan. Sekarang ini kalau memang kesimpulan kita buat.

Yang pertama, Komisi IX DPR RI menerima aspirasi yang disampaikan dari Serikat Pekerja PT Indosat dan Serikat Pekerja LKBN Antara terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada pekerja tanpa melalui perundingan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian yang kedua, Komisi IX DPR RI akan melakukan RDPU mengundang masing-masing direksi PT Indosat dan LKBN Antara, ini kalau mau ditambah dengan Dirjen PHI atau mau ditambah dengan yang lain terserah, untuk menyelesaikan permasalahan PHK yang disampaikan SP PT Indosat dan SP LKBN Antara.

Untuk yang nomor tiga ini, tadi darurat, karena usulan dari Aspek maupun dari teman-teman, karena masih.

KETUA SERIKAT PEKERJA ANTARA:

Pimpinan, izin.

Yang SP Antara bukan hanya PHK. Saya mau nambahin 'dan mutasi'.

KETUA RAPAT:

Nanti baru di koreksi, koreksinya nanti.

Yang ketiga ini darurat. Mau kita buat terserah. Tapi kalau saya melihat tadi karena ada terus dia PHK berlanjut, alangkah bagusnya kita buat surat ini ke Kemenaker maupun juga ke direksi. Dan surat ini kalau bisa besok sudah harus dikirim. Silakan teman-teman semuanya.

Dari anggota dulu Pak untuk ini, nanti baru kita serahkan kalau ada masukan-masukan. Ini ke anggota dulu. Silakan para anggota kalau ada masukan yang tiga ini. Yang mau ditambah, yang mau di hapus, atau mau dikosongkan semua, terserah, silakan.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Izin, Pimpinan, Intan Fauzi, Fraksi PAN.

Terima kasih Pak Ketua.

Poin satu tidak ada masalah.

Poin dua dan tiga ini memang Pak Ketua kita ini baik hati sekali. Jadi kalau poin dua artinya kita sebagai mediator mempertemukan antara manajemen BOD Indosat dengan Serikat Pekerja Indosat, Manajemen Antara dengan Serikat Pekerja Antara. Mungkin kita kembali kepada tupoksi kita kembali, kita ini/Komisi IX mitranya adalah Kemenaker. Jadi tadi saya setuju kalau ada usulan Pak Saleh, justru kita dorong yang memang berurusan langsung, dalam hal ini adalah Ditjen PHI (Peselisihan Hubungan Industrial), dan pejabatnya mempunyai kewenangan adalah Dirjen PHI. Jadi mungkin itu yang bisa kita dorong.

KETUA RAPAT:

Langsung bahasanya dibuat disitu, apa bahasanya.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Komisi IX akan melakukan RDPU mungkin itu menurut saya *delete* semua. Komisi IX akan memanggil Menaker tentunya, QQ Dirjen PHI, untuk penyelesaian permasalahan PHK. Mutasi kan ada bagian proses, itu proses dari PHK kan. Intinya kan ini bicara PHK nya. Kalau mutasi kan internal Pak, tapi kan kita bicara perselisihan hubungan industrial.

KETUA RAPAT:

Melalui Pimpinan. Tidak boleh dalam rapat dua-dua.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Oke silakan nanti ditambahkan, *toh* ini anggota. Nanti silakan.

Menyelesaikan permasalahan PHK yang disampaikan Serikat Pekerja Indosat dan LKBN Antara.

Baik, itu alternatifnya, artinya saya lebih condong kesitu, kita dorong mitra kita. Otomatis poin tiga itu hilang, karena itu bagian dari proses.

KETUA RAPAT:

Kalau yang dari Ibu Intan ini bisa tidak kira-kira jangan menyebut 'PHK' tapi 'Perselisihan Hubungan Industrial" begitu?

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Pimpinan, interupsi boleh?

KETUA RAPAT:

Belum.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Sebentar Pak. Diberikan ke saya dulu/anggota ini. Nanti ada ininya.

Oke, boleh-boleh, setuju Pimpinan, jadi kita bicara permasalahan perselisihan yang disampaikan. Tidak langsung kepada PHK nya.

KETUA RAPAT:

Ini alternatif ya. Jadi memang, baik Pak Saleh maupun juga Ibu Ning, yang sebenarnya kenapa tadi kita memanggil direksi itu dengan ada surat kita ke mereka untuk manggil kesini. Jadi sudah ada juga mungkin ketakutan bagi mereka itu untuk tidak melakukan sesuatu. Di tambah nanti kalau yang ini sudah jelas kita lakukan ini. Cuma kan ini yang alternatif Ibu ini kira-kira, Ibu Intan, maksud Ibu ini kita setelah reses?

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Besok kan waktu kita *full*.

KETUA RAPAT:

Besok *full*, hari Kamis paripurna.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Setelah paripurna kalau memang. Saya rasa bisa dipanggil dirjen saja.

KETUA RAPAT:

Begitu boleh, bisa.

Kalau tutup masa sidang katanya tidak boleh ini ada rapat.

Bagaimana bagusnya ini? Bisa? Kata Ibu Ning tadi ijin kepada semua fraksi.

F-PAN (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A):

Usul, Ketua.

Saran saya, itu kan besok yang kunjungan ke beberapa perusahaan dan ke tempat yang aborsi itu kan tidak sampai malam. Kalau tidak salah yang ke Meikarta itu Jam 15.00 sudah pulang, ke Jakarta sampai Jam 16.00.

Kenapa tidak bisa dipanggil Jam 17.00 saja mereka kesini Dirjen PHInya. Kan tidak lama ketemu. Pimpinan kan yang akan ketemu. Kalau perlu nanti kita wakafkan Pak Nabil ikut mendampingi. Saya tidak ada masalah kalau diperintah begitu. Tapi harus ada Ibu Sri Rahayu.

Lagi ini, Pimpinan, mohon maaf, tugas pimpinan yang begini-begini ini. Kita kan *manut* ini, ikut. Jadi jangan saling lempar begitu ini urusannya. Jadi karena itu tadi Ibu Ning benar setelah rapat paripurna sudah tidak ada lagi mestinya ya sudah, yang ada waktu itu besok kalau memang mau dikerjakan.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Saleh.

Jadi ini untuk alternatif kedua ini, kalau pulang dari sana biasanya teman-teman itu sudah capek. *Insyah Alloh* akan kita panggil besok Jam 10.00 Dirjen PHInya. Kita kalau keburu *oke*, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi kita panggil besok, kita usahakan besok saja dulu Jam 10.00. Paling acara satu jam itu. Di catat dari sekretariat ya, besok akan kita panggil Dirjen PHI Jam 10.00 pagi dan PPK ya Jam 10.00.

KETUA SERIKAT PEKERJA ANTARA:

Pimpinan, izin, saya boleh bantu tambahkan?

WAKIL KETUA (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Sebentar, nanti saja Pak, tunggu dulu.

F-PAN (Hj. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H., L.L.M):

Izin.

Mas, sabar. Nanti kalau teman-teman ini sudah selesai nanti di lempar ke *sampeyan*.

KETUA RAPAT:

Yang nomor tiga ini silakan. Saya tadi cuma mengusulkan ini membuat surat tertulis dari Pimpinan Komisi IX. Karena masih berlanjut ini terus dia PHK-PHK, tidak tahu kita kapan, tolong diberhentikan dulu ini. Walaupun kedudukan suratnya itu harganya atau apanya juga ya terserah, pokoknya kita surati saja. Mau dia lakukan mau tidak pokoknya kita buat surat dari Komisi IX.

Silakan teman-teman apakah nomor tiga ini mau dihapus atau mau lanjut, silakan pandangan-pandangannya.

WAKIL KETUA (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Saya, Pak Ansory, izin.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Melki.

WAKIL KETUA (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Surat ini tetap kita layangkan untuk minta RDPU dengan Komisi IX yang kepada pihak Indosat dan LKBN. Jangan cuma menghentikan ini tapi kan dia dipanggil kan, benar kan? Karena ternyata berbagai kasus yang masuk ke kita ini kalau kita bikin surat minta RDPU itu dia langsung bereaksi untuk menyelesaikan. Saya sudah pengalaman dua kali minta Pak Yanto buat surat itu. Saya tidak tahu ini kasusnya apa ini. Tapi karena gantung kita proses, suruh kasih surat. Ternyata dia telepon dia mau menyelesaikan akhirnya. Dia takut masuk DPR. Saya kira kita kasih surat saja, saya kira pasti mereka takut juga ini. Karena masuk DPR inikan menjadi isu besar dan dia harus segera menyelesaikan. Dipanggil RDPU di Komisi IX.

KETUA RAPAT:

Masih ada dari teman-teman yang lain? Ini keputusan satu, dua, tiga.

F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A):

Nomor tiga itu 'akan memanggil'.
'Meminta' terlalu rendah disitu. Barangkali 'memanggil'.

KETUA RAPAT:

Nomor dua sudah ada Pak.

F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A):

Itu nomor tiga 'Komisi IX DPR RI akan meminta', 'memanggil' barangkali bagus disitu Pak.

KETUA RAPAT:

Yang nomor dua 'memanggil', yang nomor tiga itu hanya untuk membuat surat tertulis saja kesana kedua-duanya untuk menghentikan proses.

Bagaimana, Pak Harun?

F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A):

Bagus.

KETUA RAPAT:

Jadi, satu, dua, tiga.

Biasanya selama ini juga ada saatnya nanti kita panggil, kita konfrontasi tiga-tiganya.

Bagaimana alternatif kedua tadi? Alternatif dari Ibu Intan ya.

F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A):

Alternatif Ibu Intan bagus. Hapus nomor dua. Nomor dua alternatif bagus.

KETUA RAPAT:

Sekali lagi, nomor dua 'Komisi IX DPR RI akan memanggil Dirjen PHI, Jamsos, Dirjen Binwasnaker, dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial yang disampaikan SP PT Indosat dan SP LKBN Antara'. Ini waktunya besok jam sepuluh (10.00). Tidak usah disebutkan waktunya.

Kemudian yang tiga juga besok juga sudah kita kirimkan suratnya ke setiap manajemen ini.

Satu, dua, tiga, masih ada kawan-kawan semuanya masukan?

Silakan ada masukan-masukan dari Pak Gofur, silakan Pak.

KETUA SERIKAT PEKERJA ANTARA:

Terima kasih Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi IX.

Saya hanya ingin menambahkan bahwasanya/saya ingin menyampaikan kepada Pimpinan, direksi kami sedikitpun tidak takut sama yang namanya Kementerian Ketenagakerjaan, baik itu menteri maupun dirjen.

Jadi yang mau saya usulkan tadi sesungguhnya adalah, selain dipanggil Dirjen PHI dan Jamsos, apapun pejabat yang ada di dalam Kementerian Tenaga Kerja, mereka lebih takut kalau dipanggil deputi BUMN, deputi yang membawahi Antara.

Saya pikir saya punya usul ditambahkan, yang terhormat Pimpinan. Jadi deputi BUMN yang membawahi Antara, saya lupa, nanti saya cari

namanya, itu pertambahan dan media itu ada itu Pak Hari Fajar Sampurno dulu, tapi sekarang sudah ganti, itu dipanggil dari Kementerian BUMN.

Terus satu lagi usul dari kami, surat untuk penghentian proses mutasi, PHK karyawan itu bukan hanya diberikan kepada direksi. Yakin saya, kata Pak Melki kalau kasih DPR direksi akan takut. Direksi saya aneh orangnya, tidak mungkin takut sama DPR, yakin saya. Kemarin dipanggil RDP dengan Komisi I dia tenang-tenang saja, "tidak ada urusan" katanya. Disuruh berhentiin PHK, PHK. Karena dia takut dewanya hanya Kementerian BUMN. Yang bisa mengganti jabatan dia cuma Kementerian BUMN.

Jadi saya punya usul kepada Pimpinan dan juga Anggota, kalau mau memberikan *shock therapy* kepada direksi kami tentu yang harus dilibatkan Kementerian BUMN, baik itu deputy maupun menteri langsung. Saya pikir usulan dari kami/Serikat Pekerja Antara itu, Pimpinan. Kalau diterima *alhamdulillah*. Kalau tidak diterima mudah-mudahan diterima.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dari Aspek tadi silakan.

KETUA ASPEK:

Tadi dikatakan bahwa surat ke direksi kalau ternyata direksinya tetap mau PHK akan lanjut, begitu tadi kan. Sebetulnya kepentingannya tidak saja untuk direksi, tapi juga untuk pekerjanya. Ini barusan saya ngobrol sama korban, masih ada 52 orang lagi yang butuh pegangan dari DPR. Ketika dia di intimidasi, sampai sekarang masih dihubungi terus suruh tandatangan, 52 orang itu terus dihubungi. Jadi surat menghentikan PHK nya jangan ditulis 'sementara'. Jadi menghentikan PHK sampai ada pemanggilan komisi/DPR/RDPU.

Kemudian jangan lupa tembusan dari surat itu juga ditujukan kepada SP Indosat, supaya teman-teman SP Indosat bisa membagikan itu kepada 52 orang yang sekarang sedang dalam tekanan.

Itu saja Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

SP masing-masing ya. SP masing-masing bisa kalau SP masing-masing. Cuma sebenarnya kalau tembusan ke SP masing-masing bukan hak kita sebenarnya disitu. Istilahnya cukup kita buat kesana ya. Cukup pemberitahuan secara diam-diam saja. Tapi bisa ditanyakan ke kita. Tapi walaupun nanti mungkin kalau memang bisa tembusan tidak apa-apa kita buat tembusan.

Silakan Ibu Roro.

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Terima kasih Pak Ansory.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gofur yang paling berkepentingan dalam kasus kita ini adalah BUMN itu sendiri. Karena apa

yang dilakukan Qatar, dia memang 65 persen memang pemegang saham, tapi 14 persen masih punyanya Indonesia/Dwi Warna.

Dan kami sangat paham sekali bahwasanya BUMN itu memiliki hak veto, karena sahamnya A. Artinya, yang perlu diperhatikan dalam Indosat kita adalah perusahaan telekomunikasi yang sangat strategis. Dan apabila memang ini terjadi terus menerus, bahkan *network* di *outsourcing*, itu tentu akan membahayakan Indonesia itu sendiri. Dan kami memohon, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, kami juga meminta, selain mengirimkan surat kepada PT Indosat dan Antara, kami juga memohon untuk menulis surat kepada Kedutaan Besar Qatar. Karena memang orang ini memiliki kaitannya dengan yang ada di kerajaan Qatar. CEP kami itu adalah *part of* dari Kerajaan Qatar. Dan memanggil CEO kami kesini itu sebenarnya untuk *lesson learn* kepada dia bahwasanya negara kita itu memiliki undang-undang yang dia harus patuhi.

Hari ini Beliau di *update* oleh seseorang di perusahaan kami yang mengatakan “tidak perlu melalui mekanisme PKB dan Undang-Undang Dasar”. Dan dia percaya orang yang meng-*update* dia itu benar bekerjanya, padahal salah. Dan untuk itu dia harus mendengarkan sendiri dengan kupingnya sendiri bahwasanya apa yang terjadi hari ini dia tidak boleh mengkhianati negara ini. Apalagi di ring satu itu sendiri.

KETUA RAPAT:

Sudah lewat waktu kita seperempat jam. Kita tambah 10 menit ya.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Terima kasih Pak.

Dan memang yang kami sayangkan adalah, Indosat itu maju dengan Indonesia, tapi ketika dipegang oleh mereka maka perlahan-lahan turun. Dan mereka selalu membawa kops diplomat misalnya.

KETUA RAPAT:

Sekarang materi sudah semuanya. Sekarang langsung ke keputusan apa maunya ini.

KETUA SERIKAT PEKERJA INDOSAT:

Justru itu Pak, yang nomor dua kami tadi tambahkan yang BUMN. Yang nomor tiga kami sedang memberikan latar belakang bahwasanya surat PHK itu harus juga ditembuskan ke pihak Qatar.

Dan kemudian kami juga menambahkan, tidak hanya meminta surat penghentian proses PHK, tapi kami juga meminta untuk DPR memanggil CEO kami Ahmad Al Neama untuk hadir dan menjelaskan, agar Beliau itu mengetahui bangsa Indonesia itu memiliki wakil rakyat, dan dia tidak bisa berlaku sewenang-wenang.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah kita tangkap.

Jadi pendapat dari Ibu Roro dengan Pak Gofur ini harus rakergab (rapat kerja gabungan) komisi. Dan itu biasanya sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan. Tapi kita usahakan, kita akan menghubungi Komisi VI. Walaupun tadi Pak Gofur bilang “mudah-mudahan diterima” ya mau kita terima berapa bulan ini. Tapi untuk yang sementara apa yang kita lakukan dulu darurat seperti ini itu dulu yang kita lakukan.

Pertama, sekali lagi saya bacakan, ‘Komisi IX DPR RI menerima aspirasi yang disampaikan dari Serikat Pekerja PT Indosat dan SP LKBN Antara terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada pekerja tanpa melalui perundingan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomor dua, ‘Komisi IX DPR RI akan memanggil Dirjen PHI dan Jamsos, dan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial yang disampaikan SP PT Indosat dan SP LKBN Antara’.

Kemudian yang ketiga, ‘Komisi IX DPR RI akan meminta kepada Direksi PT Indosat dan LKBN Antara melalui surat tertulis untuk menghentikan proses PHK di PT Indosat dan LKBN Antara sampai dengan ada pertemuandengan Komisi IX DPR RI’.

F-PDIP (DR. RIBKA TJIPTANING):

Usul. Ini mungkin usul yang progresif ya.

KETUA RAPAT:

Keempat Bu.

F-PDIP (DR. RIBKA TJIPTANING):

Yang keempat, *oke* lah ya tiga ini yang progresif.

Memang agak gila. Kadang-kadang membenahi sesuatu kan perlu setengah gila juga kita. Kalau yang inikan normatif. *On the spot* saja. Saya menawarkan datang ke Indosat, datang ke Antara, di masa reses. Konsekuensinya Pimpinan membuat surat pada semua fraksi, ijin fraksi.

Kan kita ini kunker komisi tanggal 28-29, itukan Jum’at-Sabtu. Minggu tidak mungkin. Seninnya dapilnya kan bisa. Nanti Selasanya kah, Rabunya, siapa saja yang bisa ikut. Itu mereka lebih demam kalau kita datang. Bawalah teman-teman wartawan sebanyak-banyaknya. Teman Antara kan banyak teman, bawa Indosiar, bawa ini, Komisi IX mendatangi Indosat, Komisi IX mendatangi Antara, begini-begini-begini. Jadi ada gebrakan yang luar biasa yang kita lakukan. Kita mau tahu ini. Ajak itu eselon satunya si PHI itu/Dirjen PHI. Syukur-syukur menterinya mau ikut, biasanya tidak. Tapi dirjennya saja tidak apa-apa, Ibu Yani. Biasanya kita suka lakukan itu. Ingat tidak dulu, Pak Ansory, kita suka *on the spot*, datangi, kita ajak dari Kementerian Tenaga Kerjanya, kita datangi kesana.

Kalau rakergab, kemarin rakergab sudah di pimpin Ketua DPR saja tidak ada kesimpulan. Ini kita datangi sudah, kita rada-rada yang progresif revolusioner. Dia itu pasti agak meriang. Akhirnya lama-lama dia minta ketemu, percaya sama saya. Daripada nanti datang lagi ini Komisi IX. Kan yang bagus pimpinan juga semua, ini Pimpinan Komisi IX sekarang ini progresif semua. Kita jadi agak terus yang datang kesana.

Di masa reses sering kita mengadakan juga rapat dulu panja. Ingat tidak Sabda itu. Ini juga ada Indra dulu masih di Komisi IX. Jadi kita datangi satu hari itu. Teman-teman yang kundapil ikut. Jadi dimasukin ini di kesimpulan keempat tidak apa-apa. Coba nanti terus kita kasih tahu teman-teman kita yang mau ikut. Yang mungkin dapilnya dekat-dekat bisa lari sebentar kita kesana datang satu hari itu. Paginya kemana dulu. Ini teman-teman kita kasih tahu, supaya mereka mengkondisikan disana kita mau datang.

Tidak usah takut kita datang. Memang perjuangan itu ada konsekuensi logis. Mungkin malah lebih bagus. Daripada nasibmu tidak jelas. Diapain, didiamkan juga begitu. Mungkin malah dipertimbangkan. Itu memang konsekuensi logis hidup itu harus ada. Kalau mau melangkah “ini menang tidak ini, menang tidak ini yang diperjuangkan”, tidur saja di rumah, saya kasih obat tidur, kasih kipas angin, pulas-pulas saja, tidak usah berjuang. Saya paling tidak senang dengan orang yang ragu-ragu. Kalau saya jadi peragu tidak jadi Tjiptaning sekarang ini

KETUA RAPAT:

Ada tambahan, Pak Melki?

WAKIL KETUA (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Ijin Pimpinan.

Biar jangan tunggu masa reses, Mbak Ning, saya usul. Daripada kita panggil-panggil ini juga repot, seperti tadi sudah disampaikan. Kan kita masih ramai disini ini, belum pada reses. Yang tadi Mbak Ning sampaikan itu kita pergi Kamis saja sudah, masih ramai-ramai ini. Hari Kamis kita lihat saja. Kalau andaikata paripurnanya Jam 10.00 kita pergi setelah paripurna. Kalau paripurnanya tidak jelas kapan, kita pergi pagi. Kalau begitu kita pergi pagi saja, kan pasti tidak mungkin Jam 10.00 Paripurna. Kita pergi Jam 09.00 pagi. Jam 09.00 pagi hari Kamis kita pergi cek itu, cocok saya.

KETUA SERIKAT PEKERJA ANTARA:

Pimpinan, kalau Pimpinan datang hari Kamis ke Antara keren, kita sambut.

WAKIL KETUA (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Mas nya tenang saja sudah, kita paham, tenang saja. Lewat Pak Ansory ya.

KETUA RAPAT:

Kita lihat kesimpulan yang keempat, 'Komisi IX DPR RI akan melakukan kunjungan lapangan bersama Dirjen PHI dan Jamsos, dan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial di PT Indosat Tbk dan LKBN Antara yang disampaikan pada RDPU hari ini'

Ada masukan-masukan yang lain lagi?

KETUA SERIKAT PEKERJA PT INDOSAT:

Maaf Pak Pimpinan.

Kalau yang Qatar apakah memungkinkan atau tidak menuliskan suratnya itu di CC kan ke Kedutaan Besar Qatar.

KETUA RAPAT:

Tidak. Jadi ini untuk tembusan ke SP juga tidak. Kita DPR ini, kita hanya mengirim surat ke yang bersangkutan, ke PT Indosat dan juga ke Antara. Kita lembaga ke lembaga. Tidak ke SP, tidak ke ini ya. Jadi kalau Al Neama itu nanti akan kita adakan cara yang lain.

KETUA ASPEK:

Mohon izin sebentar saja Pak.

Kalau memang tidak bisa ada tembusan, saya pikir ini bisa dapat ya nanti *print out*-nya hasil rapat hari ini.

KETUA RAPAT:

Bisa saja.

KETUA ASPEK:

Soalnya buat pegangan 52 orang ini Pak.

KETUA RAPAT:

Ada yang lain, sudah?

'Memanggil' yang nomor dua besok jam sepuluh (10.00). Saya sudah siapkan waktu itu.

Kira-kira bisa ditelepon tidak? Biasanya bisa. Kalau menteri kan harus satu hari sebelumnya. Kalau dirjen dia bisa biasanya. Seperti kita kemarin-kemarin kan dirjen bisa. Besok jam sepuluh (10.00), karena jam satu (13.00) kita sudah *on the spot*.

Masih ada yang lain?

F-PDIP (Dra. SRI RAHAYU):

Ijin, Ketua.

Kalau memungkinkan jangan Jam 10.00, sehingga yang lain-lain tiga nanti bisa. Mungkin Jam 09.00 pagi.

KETUA RAPAT:

Bisa, saya siap.

F-PDIP (DRA. SRI RAHAYU):

Itu yang pertama.

Yang kedua, ini hanya diperuntukkan Komisi IX dan teman-teman dari SP Antara maupun Indosat. Kalau kita sidak sudah ada yang membocorkan berarti ada orang lain yang membocorkan. Yang namanya sidak itu tidak boleh tahu. Kalau ada yang menyampaikan berarti kita bukan sidak lagi, mereka sudah siap-siap menerima dengan muka yang manis kepada kita semua. Oleh karena itu saya minta dengan hormat kepada semuanya ini hanya untuk kita semua, tidak boleh disampaikan kepada mereka.

Dan saya juga usul bahwa ketika sidak nanti menurut saya lebih baik pagi, Jam 08.00 berangkat. Bagi yang tidak hadir langsung di tinggal. Nanti disampaikan kepada kapoksinya masing-masing. Tolong dari teman-teman supaya bisa berangkat pagi. Kita juga paripurna tidak terlalu lama terlambatnya, semuanya bisa kita tangani. Dan kita tidak perlu untuk izin ke fraksi-fraksi kalau pelaksanaannya sebelum penutupan Rapat Paripurna.

Terima kasih Pimpinan.

INTERUPSI F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A):

Interupsi, Pimpinan, sedikit.

Ini nanti besok yang mana duluan? Indosat atau Antara? Sebab kalau ada teman-teman terlambat kan bisa langsung ke Indosatnya atau langsung ke Antaranya.

KETUA RAPAT:

Ini kan hari Kamis Pak. Kalau yang besok kita baru manggil ini. Besok ini baru yang nomor dua ini 'Komisi IX akan memanggil Dirjen PHI dan Jamsos'. Dan ini hanya dirjen dari Kemenaker yang ikut besok untuk memberitahu permasalahan kita sekarang. Biar mereka bergerak cepat.

Kemudian yang nomor tiga itu membuat surat, besok juga kita buat suratnya itu diantar, untuk menyetop proses PHK yang masih berlangsung.

Yang keempat akan kita lakukan hari Kamis Jam 08.00. Itu nanti terserah, mau Jam 08.00, mau Jam 09.00.

Mungkin nanti langsung saja rombongan itu kedua titik itu. Jadi bukan dua. Jadi langsung rombongan itu. Karena cuma berjarak 20 meter dari Indosat ke Antara, jadi dekat dia. Satu rombongan saja semuanya. Satu rombongan itu ke Indosat juga ke Antara.

Baik, kita tutup. Masih ada yang lain? Terima kasih semuanya.

F-KB (H. HARUNA, M.A., M.B.A):

Doa dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Kesimpulan sudah kita sepakati ya kesimpulannya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak-bapak/Ibu semuanya, sudah selesai rapat kita, dan sudah kita mendengarkan tanggapan-tanggapan dari anggota, dan sudah kita buat juga kesimpulan kita. Sebelum kita mengakhiri rapat kita pada sore hari ini, rapat yang cukup panjang juga. Yang saya kira tadi cuma sejam/dua jam, tahu-tahunya 5-6 jam. Kita akhiri dengan berdo'a menurut keyakinan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

(DOA BERSAMA)

Berdoa selesai.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* pertemuan saya tutup.
Selamat sore semuanya.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.40 WIB)

Jakarta, 25 Februari 2020
a. n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat

Yanto Supriyanto, S.H
NIP. 196305241992031001